

REVIEW KEDUA
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 - 2014



TAHUN 2013

DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ
PROVINSI JAWA TIMUR



KATA PENGANTAR

Kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan dan LLAJ mempunyai peranan penting dalam upaya mendorong laju pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan prima. Untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan lintas sektoral, maka pada tingkat Pemerintah Provinsi disusun RPJMD yang mengakomodasikan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah perlu menyediakan dokumen kebijakan dan program pembangunan dalam bentuk Rencana Strategis Pembangunan, yang juga merupakan penjabaran dan penajaman dari RPJMD Pemerintah Provinsi.

Buku ini merupakan review kedua Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang disusun untuk menjawab berbagai perkembangan transportasi terkini, sesuai dengan hasil analisis data dan analisis kebutuhan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan bidang perhubungan dan LLAJ serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait dalam kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ. Atas dukungan dan kerjasama semua pihak, sebelumnya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630127 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1. Dasar Pemikiran	I - 1
2. Pengertian dan Kedudukan	I - 2
3. Maksud dan Tujuan	I - 4
4. Ruang Lingkup	I - 4
5. Rentang Waktu Implementasi Perencanaan	I - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II - 1
1. Kepala Dinas	II - 4
2. Sekretaris	II - 4
3. Bidang Pengembangan Transportasi	II - 6
4. Bidang Angkutan Jalan	II - 8
5. Bidang Lalu Lintas Jalan	II - 11
6. Bidang Pengendalian Operasional	II - 13
7. Bidang Perkeretaapian dan ASDP	II - 16
8. Bidang Perhubungan Laut	II - 19
9. Bidang Perhubungan Udara	II - 21
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT)	II - 27
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	III - 1
1. Umum	III - 1
2. Sub Sektor Transportasi Darat	III - 2
3. Sub Sektor Transportasi Laut	III - 6
4. Sub Sektor Transportasi Udara	III - 9
5. Sub Ssistem ektor Transportasi Terpadu	III - 11
6. Isu – Isu Strategis	III - 13

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV - 1
1.	Kondisi Umum	IV - 1
2.	Visi dan Misi	IV - 4
3.	Tujuan dan Sasaran.	IV - 6
4.	Strategi Pencapaian	IV - 7
5.	Prioritas Pembangunan.	IV - 11
6.	Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	IV - 13
7.	Program Angkutan Perkeretaapian	IV - 15
8.	Program Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	IV - 16
9.	Program Transportasi Laut	IV - 17
10.	Program Transportasi Udara	IV - 18
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V - 1
1.	A. Rencana Program	V - 1
2.	B. Kegiatan Tahun 2009 – 2014	V - 18
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN	VI - 1

1. Dasar Pemikiran

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

Kondisi perekonomian masyarakat masih belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 dan saat ini diperparah oleh dampak krisis global, sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga secara bertahap dan sistematis dapat ditangani. Kegiatan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah.

Upaya menggali potensi sumber daya yang ada di berbagai daerah, pengembangan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi wilayah menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk bidang perhubungan dan LLAJ harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan daerah.

Rencana strategi (RENSTRA) Pembangunan Provinsi harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing sektor dan/atau lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Secara yuridis formal, integrasi RENSTRA Pembangunan dalam skala Nasional dan Daerah ini telah tertuang

dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA Pembangunan Dinas Perhubungan dan LLAJ, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, disusun mengacu dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi, yang memuat konsep, kebijakan dan program pembangunan bidang Perhubungan dan LLAJ.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat tetap terjaga.

2. Pengertian dan Kedudukan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kegiatan pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan Nasional yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan sebagai daerah otonom, fungsi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam tataran teknis penyelenggaraan akan melibatkan lembaga/instansi di lingkungan pemerintah Provinsi, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Pelaksanaan fungsi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang Perhubungan dan LLAJ, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ serta lembaga/instansi lain yang terkait. Dalam perspektif ini maka kebijakan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ di daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan dari tingkat Pusat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 25 tahun2004 tersebut, Renstra-SKPD harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif (Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah).

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan adalah menyusun agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Dokumen RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ Provinsi Jawa Timur untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2009-2014.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ,
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan dan LLAJ,
3. Mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum,
4. Menetapkan hasil kegiatan penelitian ini sebagai kebijakan pembangunan Bidang Perhubungan dan LLAJ yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup substansi RENSTRA Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.
- 2). Kebijakan prioritas pembangunan dan strategi pencapaian
- 3). Proyek kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan dan LLAJ, yang terdiri dari:
 - a). Sub Sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan ,
 - b). Sub Sektor Angkutan Jalan,
 - c). Sub sektor Perkeretaapian dan Penyeberangan,

- d). Sub Sektor Transportasi Laut,
 - e). Sub Sektor Transportasi Udara,
 - f). Sub Sektor Sistem Transportasi Terpadu,
 - g). Aspek Administrasi.
- 4). Aspek Keuangan dan pembiayaan pembangunan.
 - 5). Aspek pengendalian pembangunan dan LLAJ, yang terdiri dari monitoring dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

5. Rentang Waktu Implementasi Perencanaan

RENSTRA Dinas Perhubungan dan LLAJ ini merupakan penjabaran dan penajaman dari RENSTRA dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pembangunan bidang perhubungan dan LLAJ. RENSTRA Provinsi Jawa Timur disusun dengan implementasi rencana sesuai dengan masa Jabatan Gubernur, yaitu sampai tahun 2014, sehingga RENSTRA Dinas Perhubungan dan LLAJ ini mempunyai rentang waktu implementasi rencana sampai tahun 2014.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA DAERAH

Sebagaimana amanat yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 82 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (multiplier effect) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang transportasi diharapkan mampu secara effect langsung (direct effect) dan effect tidak langsung (indirect effect) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (economic benefit) yang tinggi. Demikian juga sebaliknya harus mampu mengeliminasi dampak samping operasional transportasi jalan yang dapat menimbulkan beban dan biaya ekonomi tinggi (high cost economi).

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ditetapkan sebagai bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Jawa Timur, yaitu dalam hal pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, guna mengakomodir implikasi dan berbagai ketentuan agar penyelenggaraan transportasi dapat berperan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan baik lokal, regional maupun nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dibentuk Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mempunyai :

a. *Tugas Pokok*

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

b. *Fungsi*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas,
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan,
3. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pemberian fasilitasi bimbingan keselamatan dan ketertiban Transportasi,
4. Pemberian perijinan dan fasilitasi bimbingan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, angkutan perkeretaapian, angkutan laut dan angkutan udara, serta penyiapan bahan penetapan tarif angkutan jalan kelas ekonomi.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan serta penyelenggaraan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor,

6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan serta penyidikan pelanggaran di bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan,
7. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas angkutan jalan dan kereta api, laut serta udara.
8. Penyusunan, penetapan dan pengembangan jaringan transportasi,
9. Pengaturan perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta transportasi laut dan udara
10. Penetapan standart batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan antar Kab. / Kota,
11. Penetapan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang,
12. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, dan
13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2. ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pengembangan Transportasi
4. Bidang Angkutan
5. Bidang lalu Lintas Jalan
6. Bidang Pengendalian Operasional
7. Bidang Perkeretaapian dan LLASDP
8. Bidang Perhubungan Laut
9. Bidang Perhubungan Udara
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLAJ
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris, Kepala Bidang, sedangkan UPT LLAJ dipimpin oleh Kepala Unit Teknis, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memimpin Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dalam perumusan perencanaan kebijaksanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, rekayasa, manajemen dan pengaturan bidang transportasi dan Lalu Lintas Angkutan.

2. SEKRETARIS

Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008 Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- 6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- 8) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Sub Bagian Keuangan

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan keperpustakaan.
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat
- d. Mempersiapkan seluruh rencanan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, pensiun peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan pegawai dan disiplin pegawai, menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya.

- e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris

2) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
- b. Melaksanakan pengolahan data.
- c. Melaksanakan perencanaan program.
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan.
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan laporan keuangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

3. BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008, Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian dan perencanaan pembangunan sistem transportasi serta perumusan kebijakan teknis di bidang Transportasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengembangan transportasi, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana penataan sistem transportasi wilayah
- b. penyusunan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi
- c. penyusunan bahan rencana pengembangan transportasi berkelanjutan
- d. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi
- e. penyusunan bahan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi;
- g. penyusunan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi di bidang transportasi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pengembangan Transportasi terdiri atas:

- 1) Seksi Pengembangan Sistem;
- 2) Seksi Pengembangan Sarana;
- 3) Seksi Pengembangan Prasarana

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana penataan sistem transportasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan transportasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi di bidang transportasi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan jaringan trayek angkutan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi;
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana transportasi;
- b. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan sarana transportasi;

- c. menyiapkan bahan dalam rangka resolusi masalah-masalah transportasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data / informasi pengembangan sarana;
- e. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sarana transportasi;
- f. melaksanakan analisa dan evaluasi mengenai pengembangan sarana transportasi;
- g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengembangan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana pengembangan prasarana transportasi;
- b. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan prasarana transportasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi guna pengembangan prasarana transportasi;
- d. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang prasarana transportasi;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi mengenai pengembangan prasarana transportasi;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG ANGKUTAN JALAN

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008, Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa angkutan jalan, pemberian izin atau rekomendasi, pengembangan keterpaduan pelayanan serta pelaksanaan sistem informasi angkutan jalan.

Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan penyiapan bahan manajemen angkutan jalan;
- 2) pengumpulan dan penyiapan bahan rekayasa angkutan jalan;
- 3) penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan, serta bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan;
- 4) penetapan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi

- 5) penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;
- 6) pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Angkutan terdiri atas :

- 1) Seksi Angkutan Dalam Trayek;
- 2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
- 3) Seksi Jaringan Angkutan Jalan.

Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

1) Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional angkutan dalam trayek;
- b. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan dalam trayek;
- c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atau pertimbangan pelayanan ijin Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
- d. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan dalam trayek;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- f. menyiapkan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan angkutan dalam trayek;
- g. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- h. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi ;
- i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek;

- b. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan tidak dalam trayek;
- c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan sewa;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- f. menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi / wilayah operasinya melebihi wilayah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi ;
- g. menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan;
- h. menyiapkan bahan pemberian izin operasi / angkutan barang khusus dan angkutan barang berbahaya;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan angkutan musiman;
- j. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif angkutan jalan tidak dalam trayek;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

3) Seksi Jaringan Angkutan Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan evaluasi pelayanan penyelenggaraan angkutan orang yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi ;
- b. menyiapkan bahan survai jarak tempuh, okupansi penumpang angkutan antar kota;
- c. menyiapkan bahan evaluasi terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Propinsi ;
- f. menyiapkan bahan sistem informasi angkutan penumpang Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan angkutan barang;
- g. menyiapkan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan;

- h. menyiapkan bahan inventarisasi, seleksi, verifikasi dan sertifikasi pengemudi angkutan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. BIDANG LALU LINTAS JALAN

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008, Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana angkutan jalan.

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- b. penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. penyiapan bahan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
- d. penyiapan bahan penetapan kelas jalan;
- e. penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- g. penyiapan bahan akreditasi, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- i. penyiapan bahan untuk penetapan strata dan sertifikasi penguji kendaraan bermotor;
- j. penyiapan bahan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pemantauan penilaian dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- l. penyiapan bahan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun terminal dan persetujuan pengoperasian terminal;
- m. penyiapan bahan akreditasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa;
- 2) Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana ;
- 3) Seksi Teknik Rancang Bangun;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
- b. menyiapkan bahan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan usulan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;
- d. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya;
- f. menyiapkan bahan pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan;
- h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana kegiatan akreditasi sarana dan prasarana jalan;
- b. menyiapkan bahan penilaian kondisi sarana dan prasarana jalan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan analisis dan evaluasi sarana dan prasarana jalan;
- d. menyiapkan bahan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana jalan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan terminal;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lokasi terminal penumpang;
- g. menyiapkan bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang;

- h. menyiapkan bahan pemberian persetujuan pengoperasian terminal penumpang;
- i. menyiapkan bahan pemantauan dan penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas di jalan;
- j. menyiapkan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu lalu lintas jalan ;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Teknik Rancang Bangun mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan inventarisasi kendaraan wajib uji ;
- b. menyiapkan bahan pengawasan penetapan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan, petunjuk dan pengaturan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta bengkel konstruksi karoseri ;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
- e. menyiapkan bahan pemeriksaan fisik dan spesifikasi serta penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ;
- f. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan penerbitan pembebasan uji berkala pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara lengkap ;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap teknis rancang bangun dan modifikasi kendaraan bermotor serta fasilitas energi ;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian bengkel konstruksi serta spesifikasi kendaraan bermotor ;
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

Tugas Pokok Dan Fungsi

Bidang Pengendalian Operasional LLAJ mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum serta

bimbingan operasional keselamatan lalu lintas angkutan jalan.. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) penyiapan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) penyiapan bahan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) penyiapan bahan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) penyiapan bahan kegiatan pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Operasional LLAJ, terdiri atas :

- 1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan ;
- 2) Seksi Fasilitas Operasional;
- 3) Seksi Pengawasan dan Penertiban.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. menyiapkan media pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyiapkan bahan audit keselamatan jalan dan audit kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

- f. menyiapkan bahan usulan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. menyiapkan bahan pemberian informasi kepada masyarakat tentang kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. menyiapkan bahan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Fasilitas Operasional, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana perawatan dan pemeliharaan fasilitas operasional;
- b. menyiapkan bahan pembinaan petugas operasional;
- c. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi pengoperasian fasilitas operasional;
- d. menyiapkan petunjuk / tata cara kegiatan operasional dan penggunaan fasilitas operasional;
- e. menyiapkan petunjuk / tata cara pemanduan / pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pengoperasian dan penggunaan peralatan dan penimbangan kendaraan bermotor;
- g. menyiapkan rencana pengembangan dan pengadaan peralatan operasional;
- h. menyiapkan bahan sistem informasi pengawasan, penertiban dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengawasan dan Penertiban, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. menyiapkan bahan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. menyiapkan bahan pendukung kegiatan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, jembatan timbang dan terminal;

- e. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di jalan, jembatan timbang dan terminal;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan menganalisa penyelenggaraan jembatan timbang;
- g. menyiapkan bahan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. BIDANG PERKERETAAPIAN DAN LLASDP

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008 Bidang Perkeretaapian dan LLASDP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan sarana prasarana serta pengendalian bidang perkeretaapian dan lalu lintas angkutan sungai, danau serta penyeberangan (LLASDP) dalam Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perkeretaapian dan LLASDP mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan dan penetapan rencana umum/rencana induk bidang perkeretaapian dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam Provinsi;
- 2) pelaksanaan perencanaan program pembangunan bidang perkeretaapian dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam Provinsi;
- 3) pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan bidang perkeretaapian dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam Provinsi

Bidang Perkeretaapian dan LLASDP , terdiri atas :

- 1) Seksi Perkeretaapian;
- 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ;
- 3) Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Perkeretaapian Dan LLASDP.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang

1) Seksi Perkeretaapian

- a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi
- b. Penetapan dan sasaran arah kebijaksanaan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kab/ kota yang jaringannya melebihi wilayah kab / kota dalam provinsi
- c. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah kab/ kota.
- d. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna jasa
- e. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada penyedia.
- f. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh Badan Usaha Prasarana Kereta Api.
- g. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi lintas kab/ kota dalam satu provinsi
- h. Pengkajian dan evaluasi sarana, prasarana dan operasional perkeretaapian
- i. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kereta api
- j. Izin pembangunan prasarana yang melintasi jalur kereta api

2) Seksi LLASDP (Lalu lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan Sungai dan Danau antara Kabupaten / Kota Dalam Provinsi
- b. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antara Kab/ kota dalam Provinsi.
- c. Penetapan lintas penyeberangan antara Kab/ Kota Dalam provinsi
- d. Pengadaan sarana dan prasarana SDP.
- e. Pengawasan terhadap surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau dibawah 7 GT
- f. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP yang terletak pada jaringan jalan Nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api
- g. Penetapan rencana induk, DKKR/ DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- h. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.

- i. Pengkajian dan evaluasi sarana, prasarana dan operasional Angkutan SDP (Sungai, Danau dan Penyeberangan)
- j. Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
- k. Pemetaan alur sungai lintas Kab/ Kota Dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.
- l. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.
- m. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
- n. Penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan Dalam Provinsi

3) Seksi Keselamatan, Pengendalian Operasional Perkeretaapian dan ASDP

- a. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP lintas Kab/kota dalam provinsi
- b. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal lintas penyeberangan antar kab dalam provinsi
- c. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- d. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.
- f. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah kab/ kota dalam satu provinsi.
- g. Pengkajian dan evaluasi keselamatan perkeretaapian dan ASDP
- h. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah kab/ kota dalam provinsi.
- i. Penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya untuk keselamatan perjalanan KA dan keselamatan jalan.
- j. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan dan / atau antar kota melebihi satu kab/ kota dalam satu provinsi
- k. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong Kereta Api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya dalam wilayah kab/ kota dalam satu provinsi.

- l. Pemberian izin operasi kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang melintasi kab/ kota dalam satu provinsi.
- m. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan perkeretaapian dalam provinsi.

8. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Tugas Pokok Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008 Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan, perkapalan dan keselamatan pelayaran serta menyusun rencana pengelolaan pelabuhan laut dan angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antar moda. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penerbitan ijin usaha angkutan laut penunjang angkutan laut dan kepelabuhanan serta perkapalan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi operasional angkutan laut dan penunjang angkutan laut.
- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional perkapalan dan keselamatan pelayaran.
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi operasional pelabuhan, pekerjaan lepas pantai, pengerukan, reklamasi, salvage, pekerjaan bawah air dan wilayah pelabuhan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan bidang perhubungan laut.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas

Bidang Perhubungan Laut , terdiri atas :

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan laut
- 2) Seksi Kepelabuhanan ;
- 3) Seksi Perkapalan dan keselamatan pelayaran.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pemerian ijin usaha perusahaan penunjang angkutan laut dan ijin usaha pelayaran bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Jawa Timur.
- b. Menyiapkan bahan pemberian ijin operasi kegiatan cabang perusahaan pelayaran nasional di Provinsi Jawa timur.
- c. Menyiapkan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota di wilayah provinsi Jawa Timur
- d. Menyiapkan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linear) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).
- e. Menyiapkan bahan perijinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- f. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh kepala bidang

2. Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional dan regional.
- b. Menyiapkan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan khusus.
- d. Menyiapkan bahan penetapan ijin pengoperasian pelabuhan khusus regional.
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut internasional dan nasional
- f. Menyiapkan bahan penetapan dan ijin reklamasi pelabuhan laut Regional.
- g. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.

- h. Menyiapkan bahan ijin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.
- i. Menyiapkan bahan penetapan DUKS di pelabuhan regional.
- j. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- k. Menyiapkan bahan monitoring kegiatan reklamasi pantai.
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bidang.

3. Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pemeriksaan kapal, pengukuran kapal, pencatatan dan penerbitan pass perairan berukuran tonage kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonage kotor sama dengan atau lebih 7 ($GT > 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin usaha salvage dan pengawasan.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional DOK/galangan kapal.
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi keberadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) telekomunikasi pelayaran, kegiatan kapal lintas daratan daerah aliran sungai (DAS) dan kapal wisata sungai dan danau
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin usaha salvage dan pengawasan.
- g. Melaksanakan Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bidang.

9. BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

Tugas Pokok Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008 Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi menyangkut pengendalian kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, penyediaan kesiapan operasi fasilitas bandar udara, elektronika, listrik dan navigasi udara, serta penyusunan rencana

angkutan udara dengan memperhatikan keterpaduan antar moda. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelancaran angkutan udara.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan sistem operasi dan keselamatan penerbangan serta kelaikan udara.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyediaan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta penataan fasilitas elektronika dan listrik
- 4) Penanganan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Perhubungan Udara , terdiri atas :

- 1) Seksi Angkutan Udara
- 2) Seksi Keselamatan Penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara.
- 3) Seksi Teknik Kebandarudaraan dan fasilitas Elektronika listrik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang

1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembuatan jaringan dan rute penerbangan dalam lingkup provinsi Jawa Timur
- b. menyiapkan bahan pemrosesan bahan pemberian ijin/rekomendasi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
- c. menyiapkan bahan ijin usaha angkutan udara niaga dan ijin angkutan udara bukan niaga yang beroperasi di wilayah provinsi.
- d. menyiapkan bahan pemberian ijin terbang/Flight Approval untuk penerbangan dalam satu provinsi.
- e. menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin perusahaan angkutan udara niaga dan ijin angkutan udara bukan niaga .
- f. menyiapkan bahan pemberian ijin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi.
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian ijin EMPU
- h. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kebutuhan angkutan udara meliputi rute, jadwal dan frekuensi penerbangan dalam satu provinsi
- i. menyiapkan bahan pengawasan kantor cabang perusahaan penerbangan asing dan agen penjualan umum/General Sales Agent (GSA)

- j. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan tarif dasar angkutan udara penumpang berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
- k. Menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara angkutan udara niaga penumpang dalam negeri kelas ekonomi.
- l. Menyiapkan bahan pengusulan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan dari dan ke provinsi.
- m. menyiapkan bahan pengusulan penetapan bandara yang terbuka untuk melayani angkutan udara dari dan ke luar negeri.
- n. Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan pada asosiasi dan agen penjualan tiket (ASTINDO)
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi komite fasilitas bandara pada bandara internasional.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian berlakunya standart dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara, navigasi penerbangan, peralatan Bandar udara dan pelayanan keamanan keselamatan penerbangan.
- b. Menyiapkan bahan pemantauan terhadap kegiatan GSE dan personil.
- c. Menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan ijin operasi bandara udara > 30 tempat duduk.
- d. Menyiapkan bahan sertifikasi personil pengangkutan bahan, bahan berbahaya, pelayanan pengoperasian Bandar udara, pelayanan keamana dan keselamatan perusahaan angkutan udara.
- e. Menyiapkan bahan pemberian ijin operasi Bandar udara yang mel;ayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udaranya tidak terkendalikan
- f. Menyiapkan bahan pemberian ijin pengoperasian Helly port.
- g. Menyiapkan bahan sertifikasi personil pengesahan program penanggulangan gawat darurat di Bandar udara.
- h. Menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi pengoperasian pesawat udara dan awak pesawat udara.

- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di Apron, PKP-PK salvage, pengamanan Bandar udara dan GSE.
- j. Menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara.
- k. Menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan prosedur lalu lintas udara.
- l. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap tanda kecakapan (lisence) petugas operasi bandara.
- m. Menyiapkan bahan pemberian ijin permohonan perusahaan penerbangan EMPU dalam rangka pengangkutan bahan-bahan berbahaya dengan menggunakan pesawat udara.
- n. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terlaksananya peraturan dan prosedur teknis operasional pelayanan keselamatan penerbangan.
- o. Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi serta menetapkan kebutuhan pelayanan keselamatan penerbangan.
- p. Menyiapkan bahan pemantauan kegiatan sertifikasi kelaikan pesawat udara.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang

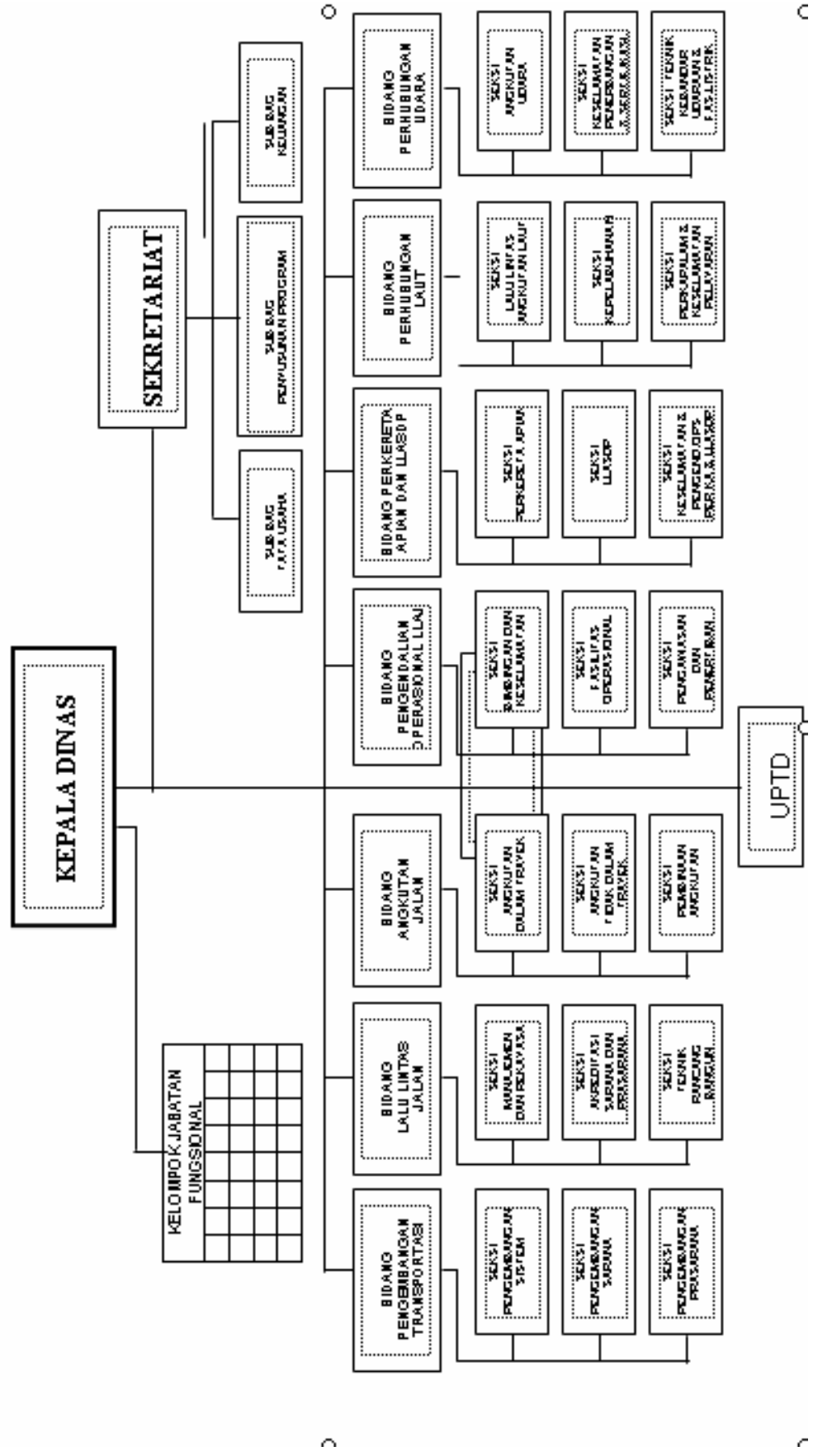
3) Seksi Teknik Kebandar Udaraan dan fasilitas Elektronika Listrik mempunyai tugas:

- 1. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
- 2. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan, penyelenggaraan pembangunan bandar udara.
- 3. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan/ijin dan pemantauan pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara yang > 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- 4. Menyiapkan bahan pemberian ijin pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara yang < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udaranya tidak dikendalikan.
- 5. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan pada rencana induk bandar udara, KKOP, Kawasan kebisingan DLKR di bandara.

6. Menyiapkan bahan pengendalian penyelenggaraan teknis udara.
7. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembangunan/pengoperasian bandar udara khusus yang melayani pesawat udara < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan.
8. Menyiapkan bahan pemberian ijin heli Port.
9. Menyiapkan bahan sertifikasi peralatan pengoperasian bandar udara dan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara
10. Menyiapkan bahan pengendalian fasilitas penunjang operasi bandara.
11. Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis kegiatan kalibrasi fasilitas telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik.
12. Menyiapkan bahan bimbingan kegiatan teknik fasilitas elektronika dan listrik bandara.
13. Menyiapkan bahan pengendalian/pengawasan pembangunan fasilitas elektronika dan listrik bandara.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :



10. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Tugas Pokok Fungsi

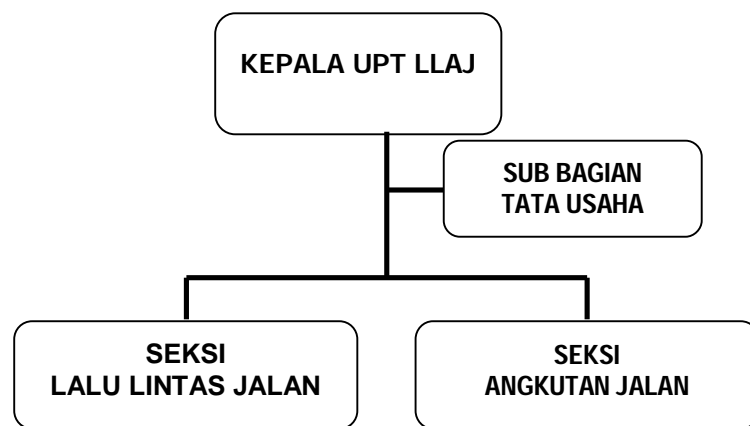
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, UPT LLAJ melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yaitu di bidang pelayanan, pengaturan, pengendalian, pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas.
- 2) pelaksanaan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- 3) pelaksanaan manajemen angkutan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan angkutan.
- 4) pelaksanaan rekayasa angkutan meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 5) pengumpulan dan pengolahan data;
- 6) pelaksanaan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kendaraan bermotor;
- 7) pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 8) pelaksanaan kegiatan pemanduan route / pengawalan kendaraan dalam rangka ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 9) pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 10) pelaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 11) pelaksanaan bimbingan dan pembinaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 12) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh kabupaten / Kota;

- 13) pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- 14) pelaksanaan perubahan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dalam keadaan tertentu.
- 15) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- 16) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LLAJ



ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**1. Umum**

Dalam kegiatan pembangunan daerah, sektor perhubungan mempunyai peranan untuk mendorong proses pembangunan dan aktivitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehari-hari. Sektor perhubungan ini terkait erat dengan hampir seluruh sektor pembangunan.

Sesuai dengan sistem pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 dan peraturan perundangan lain yang terkait, maka pengelolaan bidang perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. Di satu sisi, pembagian kewenangan ini akan mengurangi beban kerja, karena terdistribusi pada masing-masing tingkat pemerintahan, namun di sisi lain menyebabkan kesulitan pada aspek koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan, terutama karena masih besarnya egoisme masing-masing pemerintah dan lembaga. Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintahan harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Mengingat besarnya peranan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sektor transportasi, maka peranan pemerintah akan lebih banyak pada aspek fasilitator dan regulator. Dengan demikian aspek peraturan perundangan, penegakan hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Armada angkutan jalan, ASDP, laut dan udara sebagian besar disediakan dan dioperasikan oleh pihak masyarakat dan swasta.

2. Sub Sektor Transportasi Darat

A. Operasional

Peranan yang paling besar dari transportasi darat adalah moda jalan dan moda Kereta Api, Sedangkan angkutan penyeberangan mempunyai peranan besar terutama untuk melayani wilayah Kepulauan dan antar propinsi.

Angkutan jalan mempunyai peranan besar untuk angkutan dalam propinsi dan dalam kota, baik dengan moda kendaraan angkutan umum maupun moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Jawa Timur pada umumnya cukup baik. Panjang jalan yang ada di Jawa Timur terbagi atas jalan nasional 1899,21 KM dan jalan provinsi 2000,98 KM Kondisi jalan tahun 2008 yang mempunyai kondisi baik 9972,1 KM, sedang 2356,46 km, terdiri dari jalan propinsi dan jalan Nasional. Sedangkan jalan rusak sepanjang 271,14 km. Kerusakan jalan ini selain karena umur jalan dan kepadatan lalu lintas, juga disebabkan oleh kendaraan barang yang bermuatan lebih.

Kepadatan lalu lintas dan kemacetan merupakan masalah utama angkutan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jalan dalam kota. Beberapa jalan antar kota yang mempunyai kepadatan cukup tinggi antara lain ruas Surabaya-Malang, Surabaya-Jombang, Surabaya-Pasuruan. Sedangkan kemacetan yang cukup tinggi terutama di Kota Surabaya.

Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, salah satu alternatif utama adalah dengan pembangunan jalan tol. Jalan tol yang ada di Jawa Timur adalah Tol Surabaya – Porong dan Surabaya –Gresik yang panjangnya 38 km, mempunyai perkembangan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi.

Angkutan Kereta Api mempunyai peranan yang sangat penting, terutama sebagai angkutan antar kota. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, saat ini telah dikembangkan Kereta Api sebagai angkutan komuter Sidoarjo-Surabaya, Surabaya – Lamongan dan direncanakan Surabaya – Mojokerto yang diharapkan di masa mendatang dapat terus ditingkatkan, baik untuk Kota Surabaya dan kota-kota satelit yang ada di sekitarnya serta antar kota di wilayah lain, misalnya Kota Malang dan Kota Madiun dan Jember – Bondowoso – Panarukan (Sitobondo)

Angkutan Penyeberangan juga mempunyai peranan yang cukup penting, selain untuk pelayanan wilayah Jawa Timur, juga dalam skala Nasional. Jalur penyeberangan utama adalah Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Kalianget-Jangkar, Kalianget-Kangean, serta Tanjung Perak ke berbagai wilayah Nusantara, terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi Jawa Timur yang berada pada perbatasan dengan KTI, menyebabkan Jawa

Timur mempunyai peranan yang cukup penting dan sebagai pintu gerbang dalam kegiatan perdagangan ke KTI. Jalur penyeberangan dari Surabaya (Tanjung Perak) sebagian besar adalah ke KTI, misalnya ke Makasar, Banjarmasin, Balikpapan, Kumai, Ende, Kupang, dan lain sebagainya.

B. Pembangunan

Pembangunan transportasi darat ditujukan untuk memadukan moda-moda transportasi lainnya sehingga diperoleh jaringan transportasi antar moda yang terpadu. Untuk menunjang tercapainya program prioritas pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi, maka pembangunan perhubungan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas. Pengembangan angkutan penyeberangan dan sistem transportasi diperuntukan dalam meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau.

Potensi setiap moda transportasi tercermin dalam ketersediaan sarana dan prasarananya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu

1) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan yang ada di Jawa Timur terdiri dari :

- a. Lintas Penyeberangan Ujung-Kamal dengan jarak pelayaran 2 mile, waktu layar 30 menit, jenis kapal ro-ro, dan jumlah kapal 18 unit dan yang beroperasi 16 unit.
- b. Lintas Penyeberangan Jangkar-Kalianget dengan jarak pelayaran 40 mil, waktu layar 4.5 jam, jenis kapal ro-ro, jumlah kapal 2 unit.
- c. Lintas Penyeberangan Kalianget-Kangean Pulau Sapudi dengan jarak pelayaran 120 mil, waktu layar 10 jam, jenis kapal Coaster jumlah 1 unit.
- d. Lintas Gresik-Bawean jarak pelayaran 80 mile, waktu layar 2,5 jam, jenis kapal Ferry Cepat, jumlah kapal 1 unit.
- e. Lintas Ketapang-Gilimanuk jarak pelayaran 3.5 mile, 45 menit, jenis kapal ro-ro, LCT, Coaster, jumlah kapal 24 unit dan beroperasi 22 unit.

Permasalahan angkutan ASDP

- a. Masih terbatasnya pelayanan ke Wilayah Kepulauan, terutama karena keterbatasan prasarana dan sarana, tingginya biaya operasional dan jumlah penumpang yang terbatas.
- b. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan

- c. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi,
- d. Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan penumpang,
- e. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan,
- f. Masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan kepada wilayah kepulauan dalam pelayanan angkutan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2) Angkutan Jalan Rel

Jaringan pelayanan angkutan jalan rel jarak jauh dibagi menjadi 4 lintasan utama dan 1 lintasan lingkaran, yaitu :

- a. Lintas Utara dengan rute Surabaya Pasar Turi – Bojonegoro - Semarang - Jakarta
- b. Lintas Tengah dengan rute Surabaya Gubeng - Madiun – Solo – Yogyakarta - Jakarta
- c. Lintas Selatan dengan rute Malang – Blitar - Kediri – Madiun – Jakarta
- d. Lintas Timur dengan rute Surabaya – Jember - Banyuwangi
- e. Lintas Lingkaran dengan rute Surabaya – Malang – Blitar – Kediri – Jombang - Mojokerto.

Angkutan Kereta Api di Indonesia dikelola oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia yang dalam operasinya di Jawa Timur meliputi 3 Daerah Operasional (Daop) yaitu Daop VII di Madiun, Daop VIII di Surabaya, dan Daop IX di Jember. Pola jaringan kereta api dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Lintas utama dengan panjang rel yang dioperasikan 865,139 Km Spoor
- b. Lintas cabang dengan panjang rel yang dioperasikan 121,168 Km spoor dan yang tidak dioperasikan 590,474 Km Spoor.

Angkutan Komuter.

- a. Angkutan komuter dengan rute Surabaya – Sidoarjo – Porong.
- b. Angkutan komuter dengan rute Surabaya – Lamongan

- c. Angkutan komuter dengan rute Surabaya – Mojokerto

Permasalahan angkutan Kereta Api

- a. Masih rendahnya peranan KA dalam pelayanan angkutan umum massal, khususnya angkutan umum massal perkotaan (mass urban public transport)
- b. KA Komuter masih belum optimal, karena masih terbatasnya train set, headway yang terlalu panjang/lama, belum didukung feeder dan kualitas pelayanan yang belum memadai,
- c. Banyaknya rel mati/tidak berfungsi, dan bahkan pada sebagian ruas telah digunakan oleh masyarakat untuk permukiman dan lain sebagainya, sehingga untuk mengembalikan kepada kondisi dan fungsi semula akan membutuhkan proses yang sulit dan cukup panjang.
- d. Masih banyaknya persimpangan sebidang, sehingga angka kecelakaan pada persimpangan ini masih cukup tinggi,
- e. Belum terintegrasinya dengan moda angkutan yang lain.

3) Angkutan jalan

- a. Simpul transportasi angkutan jalan berupa terminal type A di provinsi Jawa Timur berjumlah 17 lokasi terminal yang tersebar di Kab./Kota, terminal type A sebagai simpul transportasi yang melayani angkutan kota dalam provinsi serta angkutan kota antar provinsi
- b. Jumlah jembatan timbang yang beroperasi berjumlah 19 lokasi dan tersebar di wilayah Kab./Kota dan langsung menjadi unit pelaksana teknis lalu lintas angkutan jalan dan berfungsi sebagai peralatan pengawasan dan pengendalian muatan lebih angkutan barang,
- c. Jumlah mobil bis yang melayani angkutan kota dalam provinsi adalah 4.022 unit, sedangkan yang melayani angkutan kota antar provinsi adalah 1.633 unit,
- d. Jumlah jaringan trayek antar kota dalam provinsi 186 jaringan trayek antar kota antar provinsi adalah 166 jaringan.

Permasalahan Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan. Hal ini tidak terlepas dari kurang optimalnya aspek pengendalian dan standar yang ditetapkan.

Kondisi ini juga diperparah dengan standar tarif angkutan umum yang rendah dan tidak ada subsidi pemerintah, sehingga pihak pengusaha angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang rendah.

- b. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memberikan pelayanan menyebabkan kendaraan pribadi masih sangat dominan,
- c. Angkutan umum perkotaan masih didominasi oleh armada kecil (mikrolet),
- d. Belum terintegrasinya antar dan inter moda,
- e. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh tidak disiplinnya berlalu lintas di jalan.
- f. Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap muatan lebih angkutan barang.

3. Sub Sektor Transportasi Laut

A. Operasional

Transportasi Laut terutama sangat berperan terhadap Transportasi Internasional, baik kegiatan impor maupun ekspor. Jumlah angkutan laut, berdasarkan data jumlah kapal yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi. Misalnya pada tahun 1991, jumlah kunjungan kapal total 9.916 kapal, kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 11.200 kapal dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 10.424 kapal, sedangkan pada tahun 2004 mencapai jumlah 7.875 kapal. Sedangkan pada tahun 2008 mencapai jumlah 7.232 kapal.

Fluktuasi transportasi laut ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Nasional yang berfluktuasi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 dan dampak krisis global yang terjadi 2 tahun ini.

Pelabuhan Utama di Jawa Timur yaitu keberadaannya didukung oleh Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Pelabuhan Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Pasuruan, Tanjung Wangi (Banyuwangi), Kalianget, Branta, Telaga Biru, Bawean, Kalbut, dan beberapa pelabuhan di Wilayah Kepulauan. Namun demikian, berdasarkan data kunjungan kapal dan jumlah barang, maka Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan utama, karena dalam skala Nasional Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Pelabuhan laut ini juga mempunyai

peranan yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Jawa Timur, terutama terhadap kemudahan kegiatan ekspor dan impor.

Volume arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak dari Tahun 1999 sampai Tahun 2003 sangat berfluktuasi. Pada tahun 1999, volume bongkar mencapai 20,075 juta ton dan volume muat mencapai 10,442 juta ton, kemudian pada tahun 2001 meningkat, bongkar mencapai 28,457 juta ton dan muat mencapai 22,757 juta ton, tetapi pada tahun 2003 turun, bongkar hanya 17,508 juta ton dan muat 11,251 juta ton, sedangkan pada tahun 2004 jumlah bongkar 21,010 juta ton dan muat 13,502 juta ton dan pada tahun 2008 jumlah bongkar 20.657 juta ton dan muat 11.483 juta ton.

Saat ini kondisi Pelabuhan Tanjung Perak sudah cukup padat, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan volume kegiatan yang tentunya akan semakin meningkat di masa mendatang, maka diperlukan pembenahan manajemen, sehingga dapat lebih efisien dan mampu menampung arus barang yang akan terus meningkat di masa mendatang.

B. Pembangunan

Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang dan jasa yang mengembangkan kegiatan ekonomi antar Pulau dan hubungan Internasional. Dalam mendukung pelayaran di Jawa Timur memiliki potensi prasarana pelabuhan yang cukup memadai, serta sarana dan prasarana pelabuhan sebagai komponen utama sub sektor transportasi laut. Sebagai gambaran sarana dan prasarana transportasi laut sebagai berikut :

- 1). Pemilik sarana kapal penumpang angkutan laut yang beroperasi di Jawa Timur, adalah milik PT. Pelni (BUMN) dan Swasta.
- 2). Kapal Perintis, beroperasi melalui rute pelayaran : Surabaya – Masalemba – Kalianget – Sapudi – Kangean – Sapeken – Tanjung Wangi (PP) dan waktu pelayaran 10 hari sekali, jenis Coaster 500 DWT, kapasitas 150 penumpang dilayani oleh KM Manpo dan KM Maiko yang beroperasi dengan sistem silang/crossing dengan home base masing-masing di Tanjung Perak dan Tanjung Wangi.

Prasarana pelabuhan, berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 2, yaitu

- 1) Pelabuhan yang Diusahakan, terdiri dari :
 - a) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
 - b) Pelabuhan Gresik Kabupaten Gresik
 - c) Pelabuhan Tanjung Wangi Kabupaten Banyuwangi

- d) Pelabuhan Probolinggo Kabupaten Probolinggo
 - e) Pelabuhan Pasuruan Kota Pasuruan
 - f) Pelabuhan Kalianget Kabupaten Sumenep
- 2) Pelabuhan yang Tidak Diusahakan, terdiri dari :
- a) Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik
 - b) Pelabuhan Masalembo Kabupaten Sumenep
 - c) Pelabuhan Kalbut Kabupaten Situbondo
 - d) Pelabuhan Sapudi Kabupaten Sumenep
 - e) Pelabuhan Sapeken Kabupaten Sumenep
 - f) Pelabuhan Telaga Biru Kabupaten Bangkalan
 - g) Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan
 - h) Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan

Permasalahan

- a. Belum efektif dan efisiennya manajemen Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga kepadatan angkutan barang menjadi tinggi dikarenakan keterbatasan peralatan penunjang pelabuhan.,
- b. Masih tingginya tarif pelayanan angkutan barang, baik petikemas maupun general chargo pada Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga tidak kompetitif dan dapat mengganggu iklim ekonomi daerah, khususnya dalam rangka menarik investasi pembangunan.
- c. Kewenangan pemprop Jawa Timur dalam pengelolaan Pelabuhan, sesuai KM 53/2001, masih belum dilaksanakan karena saat ini pelabuhan regional masih menjadi kewenangan Departemen Perhubungan,
- d. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan kurangnya peralatan dan pemeliharaan kapal khususnya kapal – kapal rakyat.

4. Sub Sektor Transportasi Udara

A. Operasional

Transportasi Udara mempunyai peranan penting, terutama untuk angkutan penumpang jarak jauh, antar pulau dan Internasional. Dengan turunnya harga tiket pesawat dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan lonjakan penumpang yang sangat tajam. Hal ini terjadi baik pada penerbangan Nasional maupun Internasional. Pada penerbangan Nasional, jumlah pesawat datang di Bandara Juanda pada tahun 2001 adalah 27.620 pesawat dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 38.880 pesawat. Pada

tahun 2004 sebanyak 46.166 pesawat sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 38.962 pesawat. Demikian juga halnya dengan perkembangan penumpang, mengalami peningkatan yang cukup tajam. Jumlah penumpang pada tahun 2001 adalah 2.712.895 orang dan tahun 2003 meningkat menjadi 4.981.113 orang. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah penumpang meningkat menjadi 7.899.266 orang. Sedangkan pada penerbangan Internasional cukup berfluktuasi, misalnya jumlah pesawat berangkat pada tahun 1999 sejumlah 1.883 pesawat, kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 3.256 pesawat dan pada tahun 2003 turun menjadi 2.707 pesawat. Sedangkan pada tahun 2008 adalah sebesar 4.104 pesawat, untuk penerbangan Domestik jumlah pesawat berangkat tahun 2003 adalah 38.860 pesawat, kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 38.962 pesawat.

B. Pembangunan

Kegiatan pembangunan transportasi udara di Jawa Timur yang telah dan tengah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bandar Udara Komersial Internasional Juanda Surabaya :
 - a). Penerbangan Domestik dilayani oleh Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Mandala Airlines, Mandala Airlines, Lion Air, City Link, Pelita Air Service, Sriwijaya Air, Batavia Air dan Trigana Air Service, dll.
 - b). Penerbangan Internasional dilayani oleh Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Malaysian Air System, Cathay Pasific, Eva Air, Lion Air, Royal Brunei.
- 2) Bandara Udara Militer/Khusus :
 - a) Bandara Abd. Rahman Saleh Malang yang juga berfungsi untuk komersial;
 - b) Bandara Iswahyudi Madiun, yang pada saat ini sedang dilakukan penelitian berkenaan dengan upaya peningkatan fungsi pelayanan penerbangan sipil komersial, disamping fungsi utamanya sebagai pangkalan TNI-AU.
- 3) Lapangan Terbang Khusus
Lapangan Terbang Khusus Pagerungan.

Rencana Pengembangan Bandara Udara :

- a) Bandara Blimbingsari Banyuwangi
- b) Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumenep

- c) Bandara Bawean Kabupaten Gresik
- d) Bandara Pacitan
- e) Bandara Jember

Secara umum Bandara Udara Internasional Juanda terjadi kenaikan jumlah pesawat datang maupun berangkat, jumlah penumpang datang dan berangkat, serta jumlah bongkar muat barang. Oleh karena perlu dikembangkan sarana dan prasarana yang ada saat ini, dimana pada Tahun 2003 telah dilaksanakan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana melalui dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang direncanakan selesai pada Tahun Anggaran 2006.

Permasalahan

- a. Masih tingginya angka kecelakaan moda angkutan udara. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya pengawasan standar keselamatan penerbangan, pengawasan kelengkapan fasilitas keamanan dan keselamatan,
- b. Pada Bandara Juanda, kepadatan penumpang sangat tinggi, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana parkir dan sarana pendukung lainnya,
- c. Bandara-bandara perintis yang ada belum dimanfaatkan secara optimal,
- d. Potensi pengembangan bandara, antara lain Abdulrahman Saleh dan Iswahyudi belum direalisasikan secara optimal. Berdasarkan perkembangan kegiatan operasional Bandara Abdulrahman Saleh menunjukkan bahwa load factor penumpang dari dan ke Bandara Abdulrahman Saleh cukup tinggi, sehingga cukup layak untuk ditingkatkan.
- e. Kapasitas bandara Juanda saat ini telah melampaui kapasitas yang direncanakan sehingga saat ini pelayanan bandara Juanda pada waktu puncak mengalami over kapasitas.

5. Sub Sektor Sistem Transportasi Terpadu

Kinerja penyelenggaraan sistem transportasi terpadu ditentukan oleh berbagai stake holders, mengingat keterpaduan pelayanan transportasi ini mempunyai elemen penyelenggara yang cukup banyak, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Pada dasarnya, pengertian sistem transportasi terpadu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *pertama* terpadu dalam arti terintegrasinya pelayanan

antar dan inter moda angkutan dan yang *kedua* adalah terpadu dalam arti suatu pelayanan terintegrasi mencakup berbagai aspek, misalnya pelayanan jasa moda angkutan itu sendiri, pelayanan prasarana pendukung, pelayanan jasa asuransi, pelayanan jasa kesehatan dan lain sebagainya.

Mengingat penyelenggaraan pelayanan transportasi di Jawa Timur, dari sisi pemerintahan, dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, kabupaten dan kota, maka kinerja pelayanan ini juga sangat ditentukan oleh kinerja seluruh stake holders tersebut.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pada dasarnya telah dilakukan antara lain dengan meningkatkan keterpaduan lintas moda transportasi, yaitu antara moda transportasi darat, laut dan udara. Berdasarkan kontribusi, maka transportasi darat memegang peranan yang paling besar, oleh karena itu sinkronisasi dan integrasi moda angkutan darat ini menjadi sangat penting dan strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Integrasi pelayanan lintas wilayah sangatlah penting, oleh karena itu koordinasi lintas pemerintah daerah perlu terus dilakukan dan ditingkatkan.

Pada wilayah perkotaan, terutama kota Surabaya metropolitan area dan Malang Raya, peranan angkutan umum tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, tetapi juga diharapkan dapat mereduksi kepadatan lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan angkutan pribadi. Kendaraan angkutan pribadi ini pada umumnya mempunyai load factor yang rendah, karena seringkali kendaraan pribadi ini hanya berisi penumpang 1 atau 2 orang saja, sedangkan kendaraan angkutan umum dapat mempunyai loading faktor mencapai 80-100 %. Dengan demikian, pada dasarnya pergerakan satu unit angkutan umum perkotaan dapat mereduksi 3 – 5 unit kendaraan pribadi.

Permasalahan :

- a. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang murah, aman dan nyaman,
- b. Kualitas pelayanan angkutan umum yang masih rendah,
- c. Belum adanya standar pelayanan yang baku yang harus dijadikan acuan oleh para penyelenggara pelayanan angkutan umum,
- d. Belum adanya subsidi dari pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan rendah,
- e. Karena rendahnya kualitas pelayanan menyebabkan preferensi masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum menjadi sangat rendah,

- f. Koneksi inter dan antar moda yang masih sangat kurang sehingga aksesibilitas dan kenyamanan penumpang masih rendah,
- g. Koordinasi lintas kabupaten dan kota yang masih rendah.

6. ISU – ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI DI JAWA TIMUR

Isu strategis pengembangan sistem transportasi di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian prioritas dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasca pengoperasian jembatan Suramadu maka pengembangan sistem transportasi di wilayah Madura perlu segera disusun baik berupa angkutan massal yang berbasis kereta api, pembangunan pelabuhan laut bertaraf Internasional (pelabuhan Peti Kemas) yang berada di Bangkalan Utara, pengembangan Bandara Udara di Trunojoyo Kab. Sumenep yang akan dikembangkan menjadi pelayanan angkutan udara (City Link), sehingga di wilayah Madura menjadi suatu sistem transportasi terintegrasi baik inter dan antar moda,
- 2) Pengembangan pelabuhan laut Tanjung Wangi Kab. Banyuwangi yang akan difungsikan sebagai Pelabuhan Peti Kemas yang diperuntukkan untuk kegiatan barang ekspor dan import di wilayah Timur Provinsi Jawa Timur,
- 3) Pengembangan angkutan massal perkotaan yang berbasis jalan rel dimana saat ini telah ada dokumen perencanaan teknis oleh SNCF dan telah masuk dalam Blue Print Bappenas dan selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan MOU antara Menteri Perhubungan dengan Gubernur Jawa Timur.
- 4) Pengembangan pelabuhan laut Sendang Biru di wilayah selatan Jawa Timur sangat penting dan strategis karena saat ini telah dibangun jalan alur lintas selatan sehingga nantinya pelabuhan tersebut akan terintegrasi dan sebagai out let sistem transportasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah selatan yang mempunyai potensi yang besar dimana saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan infrastruktur yang belum tersedia.
- 5) Pengembangan pelabuhan penyeberangan di wilayah kepulauan Kab. Sumenep dimana saat ini pelayanan transportasi hanya dilayani oleh angkutan laut, untuk itu pengembangan angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pulau di wilayah Kab. Sumenep yang setiap saat dapat dilayani, sehingga nantinya wilayah tersebut tidak terisolir pertumbuhannya dari wilayah kepulauan lainnya.

- 6) Pengembangan pelabuhan laut Tanjung Tembaga di Probolinggo merupakan pelabuhan sebagai Back Up sistem transportasi (alternatif), dimana pelabuhan tersebut yang mempunyai fungsi strategis bagi Provinsi Jawa Timur. Khususnya untuk kegiatan distribusi angkutan barang baik export maupun inport untuk wilayah Probolinggo dan hinterlandnya sebagai antisipasi suatu saat bencana lumpur lapindo akan tidak dapat dikendalikan sehingga akan mengganggu kelancaran transportasi di wilayah tersebut.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**1. Kondisi Umum**

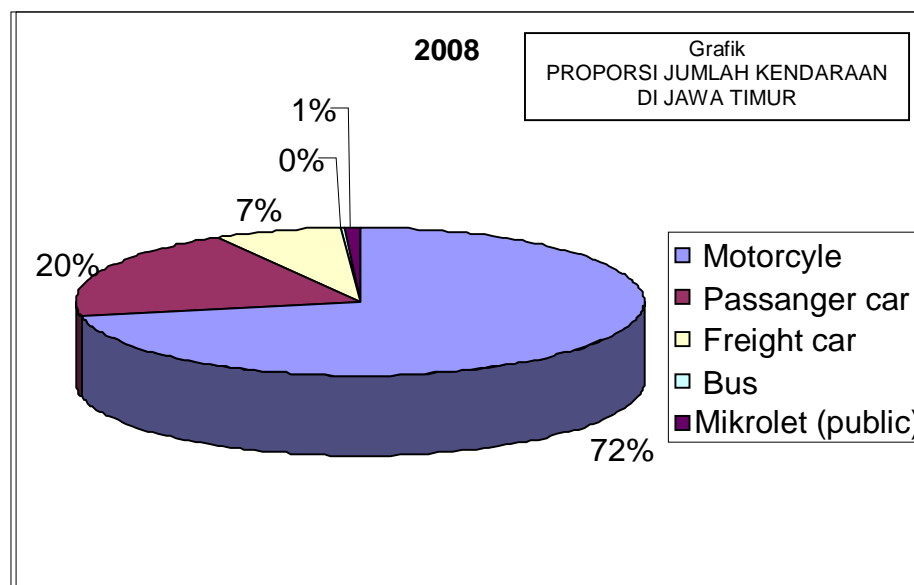
Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun hankam. Perekonomian Jawa Timur memberikan kontribusi yang cukup besar, yang mencapai 14,6 %, kedua setelah DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk terbesar, maka Jawa Timur merupakan pangsa pasar yang sangat besar, disamping tentunya merupakan potensi SDM yang sangat potensial. Dalam sistem aliran barang dan jasa, Jawa Timur merupakan pintu gerbang bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan kegiatan ekspor dan impor. Posisi, peran dan kedudukan Jawa Timur dalam skala Nasional tersebut tentunya tidak terlepas dari peranan sektor Perhubungan dan LLAJ.

Fungsi dan peranan Jawa Timur dalam skala Nasional tersebut didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Moda transportasi jalan dari Jawa Timur mempunyai tujuan ke berbagai Provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra untuk arah barat, sedangkan ke arah timur mencapai Provinsi Bali, NTB dan NTT. Moda transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung aliran barang dan jasa dari Jawa Timur ke Provinsi lain, baik KTI maupun Provinsi lainnya. Pelabuhan Tanjung Perak mempunyai peranan yang sangat strategis, baik untuk transportasi skala Nasional maupun Internasional, disamping beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Jawa Timur. Sedangkan moda transportasi udara dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, baik untuk jaringan Nasional maupun Internasional.

Dalam peranan internal Provinsi Jawa Timur, pelayanan bidang perhubungan masih sangat beragam, namun demikian, peranannya tetap masih sangat strategis. Aksesibilitas antar wilayah yang masih sangat beragam, wilayah selatan dan wilayah kepulauan mempunyai aksesibilitas yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar dari pihak pemerintah. Sementara itu pada wilayah perkotaan, pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar bagi masyarakat golongan bawah, disamping tentunya

juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan pada umumnya masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir, ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi dan penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi, dan pada sebagian besar ruas jalan utama mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi.

Pelayanan angkutan umum massal (mass public transport), sebagai solusi terpenting dalam pelayanan angkutan umum dan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas masih sangat sulit diwujudkan, terutama karena keterbatasan dana. Pelayanan angkutan umum bus kota di Surabaya misalnya, masih sangat rendah, baik dari aspek keamanan, kemudahan maupun dari aspek kenyamanan. Bus kota masih banyak dilihat dari kaca mata bisnis semata, alat untuk mencari keuntungan secara maksimal, yang konsekwensinya adalah rendahnya kualitas pelayanan. Mencermati perkembangan wilayah perkotaan di Jawa Timur, maka beberapa wilayah perkotaan sudah sangat membutuhkan pelayanan bus kota, misalnya Wilayah Gerbangkertosusila, Malang Raya, Madiun, Jember, Kediri dan beberapa kota sedang lainnya.



Kondisi umum bidang perhubungan dan LLAJ di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas pelayanan angkutan umum secara keseluruhan masih rendah. Pelayanan angkutan umum jalan raya (road way) masih relatif rendah, terutama apabila ditinjau dari aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan angkutan umum. Kondisi ini membawa dampak pada semakin tingginya volume lalu lintas pada wilayah perkotaan, terutama pada wilayah Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun, Kediri dan beberapa kota menengah lainnya. Jumlah penumpang yang memanfaatkan kendaraan angkutan umum jalan raya (road way) diperkirakan hanya sekitar 6 %, dan 2 % menggunakan moda angkutan Kereta Api, sedangkan 92 % menggunakan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor). Armada angkutan umum perkotaan umumnya sudah berusia lebih dari 10 tahun dengan kondisi yang kurang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan, sehingga aspek keselamatan penumpang menjadi rendah.

- 2) Angkutan umum moda Kereta Api masih belum optimal, terutama apabila dilihat masih rendahnya peranan Kereta Api dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang baru mencapai sekitar 3 %. Hal ini terutama disebabkan masih rendahnya integrasi moda Kereta Api dengan moda angkutan lainnya, sehingga masyarakat kurang mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pelayanan Angkutan Kereta Api. Disamping itu, masih cukup banyak jaringan rel Kereta Api yang sudah tidak berfungsi atau bahkan telah mati dan beralih fungsi, misalnya menjadi daerah perumahan liar.
- 3) Belum adanya subsidi dari pemerintah terhadap pelayanan angkutan umum, sehingga kualitas pelayanan angkutan umum menjadi sangat rendah. Untuk menciptakan pelayanan angkutan umum yang berkualitas tentunya diperlukan investasi yang lebih besar, yang konsekwensinya adalah meningkatkan tarif sesuai dengan besarnya investasi. Tarif yang lebih tinggi ini tentunya akan sulit untuk dijangkau oleh kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memutus lingkaran setan rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum adalah dengan adanya subsidi dari pemerintah, sehingga kualitas pelayanan angkutan umum dapat ditingkatkan dengan tarif yang lebih terjangkau.
- 4) Moda angkutan Udara dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, terutama dengan turunnya tarif penumpang, sehingga lebih terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian, perkembangan angkutan udara yang pesat ini perlu diimbangi dengan pengendalian standar dan keselamatan penerbangan, karena berdasarkan data yang ada menunjukkan masih cukup tingginya angka kecelakaan angkutan udara,

- 5) Pelayanan angkutan laut ke Wilayah Kepulauan selama ini telah dilakukan. Namun demikian, pelayanan ini masih perlu peningkatan, terutama untuk mendorong perkembangan ekonomi, menggali berbagai potensi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Wilayah Kepulauan.
- 6) Mengingat pelayanan bidang perhubungan dan LLAJ dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, maka koordinasi dan sinkronisasi lintas stake holders menjadi sangat penting. Hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan sistem informasi. Hal ini tentunya juga perlu didukung dengan peningkatan manajemen di lingkungan Dinas Perhubungan dan LLAJ sebagai lembaga sentral dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.

2. Visi dan Misi (Review Terhadap Renstra tahun 2009-2014)

A. Visi :

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun hankam. Fungsi dan peranan tersebut sangat didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Moda transportasi jalan dari Jawa Timur mempunyai tujuan ke berbagai Provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra untuk arah barat, sedangkan ke arah timur mencapai Provinsi Bali, NTB dan NTT. Moda transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung aliran barang dan jasa dari Jawa Timur ke Provinsi lain, baik KTI maupun Provinsi lainnya. Pelabuhan Tanjung Perak mempunyai peranan yang sangat strategis, baik untuk transportasi skala Nasional maupun Internasional, disamping beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Jawa Timur. Sedangk

moda transportasi udara dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, baik untuk jaringan Nasional maupun Internasional.

Dalam peranan internal Provinsi Jawa Timur, pelayanan bidang perhubungan masih sangat beragam, namun demikian, peranannya tetap masih sangat strategis. Aksesibilitas antar wilayah yang masih sangat beragam, wilayah selatan dan wilayah kepulauan mempunyai aksesibilitas yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar dari pihak pemerintah. Sementara itu pada wilayah perkotaan, pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar bagi masyarakat golongan bawah, disamping tentunya juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan pada umumnya masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir, ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi dan penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi, dan pada sebagian besar ruas jalan utama mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka visi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur diarahkan pada upaya berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, maka Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi : **“MEWUJUDKAN PELAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS UNTUK Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah”**

B. Misi:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam upaya mewujudkan Visi, menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat
2. Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai *servicing sector* dan *promoting sector*

3. Tujuan dan Sasaran (Review Terhadap Renstra tahun 2009-2014)

A. Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan tersebut adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi;
- 2) Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi;
- 3) Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah

B. Sasaran:

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada yaitu :

Tujuan-1 :

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
- Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur
- Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi

Tujuan-2 :

- Meningkatkan Jumlah Penumpang Yang Terlayani

Tujuan-3 :

- Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi

4. Strategi Pencapaian

Dua sasaran pokok pembangunan bidang Transportasi yaitu peningkatan pelayanan (servicing sector), baik secara kuantitas maupun kualitas dan mendukung kebijakan pembangunan daerah (promoting sector) sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Sebagai public services, maka secara hakiki pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, namun demikian, secara teknis pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan modern, yang selalu menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan peran pemerintah lebih kepada fungsi regulator dan fasilitator, sedangkan fungsi provider dapat diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja bidang perhubungan dan postel sangat ditentukan oleh peran serta aktif dari ketiga stake holders tersebut, meskipun secara hakiki pelayanan public menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kegiatan pembangunan bidang Transportasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) stake holders dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1) Pemerintah

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum (public services) bidang perhubungan dan postel yang berkualitas dalam arti pelayanan umum yang mudah, murah, aman, nyaman dan cepat.
- b. Menyusun peraturan perundangan yang mengatur mekanisme kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi yang implementasinya dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat,
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan melakukan kemudahan perijinan, mengembangkan sistem insentif dan disinsentif, sehingga mampu mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembangunan dan pelayanan umum,
- d. Harus dapat mengintegrasikan pembangunan bidang Transportasi dengan seluruh sektor pembangunan yang lain, sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan daerah pada umumnya, dan khususnya pada upaya pemerataan serta laju pembangunan pada wilayah potensial.
- e. Menekan angka kecelakaan lalu lintas, dengan meningkatkan pengawasan, meningkatkan standar pelayanan, kelengkapan fasilitas dan pendukung aspek keselamatan berkendara.
- f. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Perhubungan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi Kabupaten dan Kota sesuai dengan wilayah administrasinya. Oleh karena itu aspek pendanaan pembangunan juga menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (APBN dan APBD), dengan mekanisme disesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan ini maka Pemerintah Propinsi harus melakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar tingkat pemerintahan dan lintas sektoral, yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur.

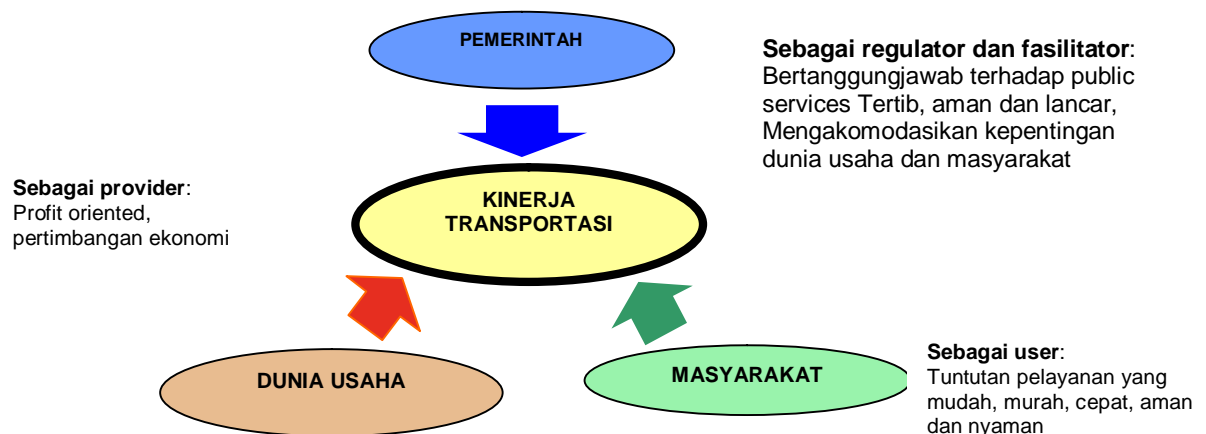
g. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan subsidi bagi pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan, yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan program yang tepat sasaran.

2) Dunia Usaha

- a. Penyedia armada angkutan umum dan provider postel yang mendukung pelayanan kepada masyarakat atas dasar pertimbangan ekonomi,
- b. Peran serta dalam bidang perhubungan dan postel selalu atas dasar pertimbangan profit oriented, oleh karena itu peraturan perundangan, standar pelayanan dan persyaratan kelengkapan fasilitas keamanan dan kenyamanan menjadi sangat penting.
- c. Sebagai mitra kerja pembangunan dan pelayanan umum, maka peran serta dunia usaha harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Masyarakat

- a. Setiap anggota masyarakat berhak atas pelayanan umum (public services) bidang perhubungan yang layak,
- b. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan saja, tetapi perlu berperan aktif dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Secara proaktif dan timbal balik, masyarakat harus menyampaikan aspirasi secara sistematis berkenaan dengan upaya perbaikan pelayanan bidang perhubungan.
- c. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, karena pelayanan yang diberikan oleh Dunia Usaha didasarkan atas pertimbangan ekonomi, sedangkan masyarakat tentunya berhak atas pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman dan cepat,



Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat masih bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan dan postel di daerah. Kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan dan postel di daerah dapat dilakukan oleh berbagai stake holders dan didanai dari berbagai bersumber, antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat (APBN)

Terutama untuk kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, antara lain untuk infrastruktur berskala Nasional dan lintas propinsi. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kegiatan pembangunan ini harus berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi, sehingga dapat melakukan sinkronisasi dan integrasi dengan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Propinsi.

b. Pemerintah Daerah (APBD)

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Propinsi, maka kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Propinsi Jawa Timur adalah kegiatan pembangunan berskala regional/propinsi, lintas kabupaten/kota dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pusat kepada propinsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kegiatan pelayanan bidang perhubungan dan postel, selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dilakukan lembaga lain, misalnya BUMN, antara lain PT KAI, PT Angkasa Pura, PT Garuda, PT Pelindo, Perum DAMRI, PT ASDP, PT PELNI, DAMRI dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan dan pembangunan yang dilakukan oleh BUMN ini pada umumnya sudah cukup mandiri, namun demikian tetap diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sampai saat ini di propinsi Jawa Timur masih belum dibentuk BUMD yang bergerak dibidang perhubungan dan postel.

e. Dunia Usaha/Swasta

Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh dunia usaha antara lain dibidang operasional pelayanan angkutan jalan raya, yaitu bus antar kota, bus kota dan pelayanan angkutan kota. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan bidang moda angkutan udara yaitu maskapai penerbangan dan pelayanan pendukungnya, antara lain biro perjalanan dan lain sebagainya.

f. Masyarakat

Masyarakat mempunyai dua peranan, yaitu sebagai user/konsumen dari kegiatan pelayanan yang diberikan, dan disisi lain sebagai provider, penyedia pelayanan, walaupun pada umumnya dalam skala kecil, tetapi mempunyai peranan yang cukup penting mengingat terdistribusi cukup merata. Kegiatan pelayanan yang dimaksud adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dalam wadah badan usaha, misalnya pelayanan wartel, pelayanan angkutan kota yang banyak dilakukan oleh warga masyarakat. Peranan masyarakat ini sangat penting, karena tentunya sangat membantu mengurangi beban pemerintah, sehingga pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung meningkatkan kualitas pelayanan.

g. Luar Negeri

Sumber dana luar negeri ini dapat berupa hibah (grant) atau loan (pinjaman) yang pada umumnya berupa pinjaman lunak, dengan masa pengembalian yang cukup lama. Sumber dana dari luar negeri ini, meskipun Pemerintah Daerah memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri, termasuk mencari peluang sumber pembangunan, tetapi tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melalui berbagai proses administrasi dengan Pemerintah Pusat.

5. Prioritas Pembangunan

Proses pembangunan pada dasarnya untuk mencapai berbagai tujuan untuk seluruh lapisan masyarakat, namun demikian, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, maka rencana pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara serentak, sehingga diperlukan adanya prioritas pelaksanaan pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada pemikiran berikut ini :

- 1) Tingkat permasalahan yang ada di lapangan,
- 2) Tingkat manfaat terhadap kebutuhan masyarakat,
- 3) Multiplier effect terhadap kegiatan pembangunan,
- 4) Efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan,
- 5) Kebijakan dan program strategis skala makro regional atau Nasional,
- 6) Ketersediaan sumber daya, baik sumber dana, SDM, teknologi maupun sumber daya pembangunan lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka prioritas pembangunan Bidang Perhubungan dan Postel adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan sangat mendesak
 - a. Pembangunan dan Penataan Angkutan Umum Perkotaan,
 - b. Peningkatan standar dan kualitas pelayanan yang menyangkut aspek keamanan dan keselamatan, sehingga bisa menekan angka kecelakaan,
 - c. Pembangunan infrastruktur perhubungan dan LLAJ pada wilayah kepulauan dan wilayah selatan Jawa Timur,
 - d. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak untuk jangka pendek dan pembangunan pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Bulu Kab. Bangkalan.
 - e. Peningkatan KA Kommuter pada wilayah Gerbangkertosusila dan Malang Raya serta angkutan massal lintas Tengah,
2. Prioritas pembangunan strategis
 - a. Perencanaan penanganan keselamatan transportasi untuk mengurangi kecelakaan dengan program Road Map To Zero Accident,
 - b. Pembangunan dan Penataan Angkutan Umum Massal Perkotaan,
 - c. Perencanaan penanganan muatan lebih secara komprehensif dalam rangkamenukung program Road Map To Zero Overloading,
 - d. Pembangunan Bandara Perintis dan Bandara Nasional,
 - e. Penataan dan Pembangunan Sistem Kepelabuhanan Nasional, Regional dan Lokal,

- f. Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional,
- g. Perencanaan Pembangunan Bandara Internasional,
- h. Perencanaan pembangunan dan pelayanan prioritas di wilayah kepulauan dan selatan Jawa Timur.

3. Prioritas pembangunan penunjang

- a. Pengembangan teknologi transportasi untuk peningkatan koordinasi lintas stake holders, manajemen data dan informasi, baik skala regional, Nasional maupun global.
- b. Peningkatan koordinasi lintas stake holders, koordinasi pembangunan lintas pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), asosiasi pengusaha bidang perhubungan dan postel, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan terpadu bidang perhubungan dan postel dalam memberikan pelayanan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan hari besar dan berbagai kepentingan Nasional lainnya yaitu :
 - 1) Peningkatan pelayanan umum perijinan dan non perijinan bidang perhubungan,
 - 2) Peningkatan koordinasi, fungsi dan peran bidang perhubungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam berbagai kegiatan Hari Nasional dan kepentingan Nasional dan Daerah.
- d. Peningkatan manajemen pembangunan Bidang Perhubungan dan Postel,
 - a. Pemantapan tugas dan optimalisasi fungsi kelembagaan
 - b. Peningkatan kualitas SDM
 - c. Peningkatan prasarana dan sarana.

6. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas Utama

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- a. Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur.
- b. Peningkatan keselamatan transportasi jalan.
- c. Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, serta penanggulangan muatan lebih melalui penindakan secara tegas.
- d. Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan, serta efektivitas peran dan fungsi jembatan timbang.
- e. Pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.

B. Program Penunjang

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman, murah, dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- a. Pembangunan transportasi umum perkotaan, dan juga pedesaan, yang terpadu dan terjangkau, berbasis masyarakat dan wilayah.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
- c. Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand management.
- d. Fasilitasi pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan yang padat (kota metropolitan).
- e. Penyediaan pelayanan angkutan umum perintis, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil.

- f. Pengembangan sistem kerja sama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi), dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan.
- g. Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun.

7. Program Angkutan Perkeretaapian

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas Utama

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana perkeretaapian untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan dan pengembangan secara bertahap kereta komuter di wilayah Gerbangkertosusila dalam satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi.
- 2) Fasilitasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perkeretaapian.
- 3) Fasilitasi peningkatan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
- 4) Fasilitasi revitalisasi jaringan kereta api di Pulau Madura, dari Bangkalan ke Sumenep, dalam rangka membangun satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi.
- 5) Fasilitasi peningkatan jalur kereta api Bangil-Jember-Banyuwangi, yakni penggantian bantalan rel dari kayu menjadi beton, perbaikan jembatan, serta jalur rel.

- 6) Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api pengganti jalur Tanggulangin-Porong.

B. Program Penunjang

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kereta Api

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kereta api, yang aman, murah, dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Sidoarjo-Tulangan-Prambon-Tarik untuk mengatasi problem transportasi yang terkendala dampak luapan lumpur Lapindo.
- 2) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Kalisat (Jember)-Bondowoso-Situbondo-Panarukan.
- 3) Peningkatan pelayanan kereta api peti kemas (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya–Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).
- 4) Fasilitasi penyediaan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi untuk masyarakat miskin yang tarifnya disesuaikan daya beli mereka.

8. Program Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) didefinisikan sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus; kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan perairan; mempunyai rute tetap dan jadwal reguler, serta bangunan kapal ferry yang berbentuk khusus.

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar-pulau, sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas ASDP

Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dermaga penyeberangan.
- 2) Pengembangan sarana dan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah kepulauan melalui pendekatan pembangunan transportasi wilayah.

9. Program Transportasi Laut

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Hampir 99% kegiatan ekspor-impor diangkut menggunakan transportasi laut. Transportasi laut juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar-pulau (dalam negeri) yang dilayani armada pelayaran nasional.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana transportasi laut.
- 2) Pengembangan pembangunan terminal peti kemas.
- 3) Peningkatan pelayanan transportasi laut bagi wilayah kepulauan.
- 4) Pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SNBP).

- 5) Pengembangan usaha di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta, *out-sourcing* maupun *public private partnership*, pada lokasi pelabuhan potensial sebagai akses sentra produksi dan pemasaran komoditas antar-wilayah, termasuk untuk penumpang.

B. Program Penunjang

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Laut

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut yang nyaman, murah dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Fasilitasi pembangunan pelabuhan laut di daerah.
- 2) Fasilitasi pengoperasian kapal laut perintis.

10. Program Transportasi Udara

Transportasi udara memiliki keunggulan kecepatan dibanding moda transportasi lainnya, menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara di Jawa Timur perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional, dan interkoneksi dengan moda lainnya.

Wisatawan mancanegara yang datang Jawa Timur menggunakan transportasi udara, karena itu untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia.

Jaminan itu dapat diwujudkan, baik oleh lembaga pemerintah pemegang otoritas pengelola transportasi udara maupun operator bandara dan perusahaan penerbangan, dengan memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas Utama

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara di bandara yang sudah ada, serta mengembangkan pembangunan prasarana transportasi udara di daerah-daerah potensial strategis untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan transportasi udara di Bandara Juanda, baik terminal internasional maupun domestik.
- 2) Pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi udara di Bandara Juanda.
- 3) Fasilitasi revitalisasi lapangan udara Trunojoyo, Sumenep.
- 4) Penyelesaian pembangunan lapangan udara perintis di Kabupaten Pacitan, dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Militer Abdulrachman Saleh dan Iswahyudi untuk melayani penerbangan sipil.
- 6) Fasilitasi pembangunan lapangan udara di wilayah kabupaten/kota yang strategis dan potensial.

B. Program Penunjang

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Udara

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi udara yang nyaman dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan jalan akses Bandara Abdurrahman Saleh, Malang
- 2) Fasilitasi pembangunan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi.
- 3) Fasilitasi pembangunan Bandara Notohadinegoro, Jember.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****A. RENCANA PROGRAM****1. TRANSPORTASI DARAT****Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, dan regional, serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain.

a. Permasalahan

- 1) Masih tingginya pelanggaran muatan lebih di jalan yang mengakibatkan kerusakan sebelum umur teknis jalan, akibat belum optimalnya pengawasan melalui jembatan timbang karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen; Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih.
- 2) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walau terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (angkutan bus antar-kota antar-provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- 3) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat rendahnya kedisiplinan pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; kurangnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; dan rendahnya penegakan hukum peraturan lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas.
- 4) Rendahnya kelancaran angkutan jalan, akibat terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibanding perkembangan armada di jalan; kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya; optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dan sebagainya; sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal.

- 5) Banyaknya pungutan dan retribusi di jalan, yang membuat biaya angkutan di jalan belum efisien.
- 6) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ, baik di tingkat regulator maupun operator, belum optimalnya pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- 7) Masih tingginya polusi udara dan suara, akibat kemacetan, dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan.
- 8) Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, terutama transportasi perkotaan, dan juga angkutan pedesaan.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih di jalan, sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
- 2) Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana dan prasarana LLAJ.
- 3) Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antar-kota.
- 4) Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, untuk mendukung perwujudan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal.
- 5) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
- 6) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota).

- 7) Meningkatnya penanganan dampak polusi udara, serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.
- 8) Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.
- 9) Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan, serta terjangkau.
- 10) Terwujudnya perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan dan penindakan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
- 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).
- 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal; manajemen lalu lintas; pemasangan fasilitas dan rambu jalan; penegakan hukum dan disiplin di jalan; mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; kerja sama antarlembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).
- 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil.
- 5) Menata sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal, antara lain melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ).

- 6) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ.
- 7) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- 8) Fasilitasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

1. Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur.
- 2) Peningkatan keselamatan transportasi jalan.
- 3) Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, serta penanggulangan muatan lebih melalui penindakan secara tegas.
- 4) Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan, serta efektivitas peran dan fungsi jembatan timbang.
- 5) Pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.
- 6) Survei Karakteristik Lalu Lintas pada Ruas Jalan Utama di Jawa Timur;

- 7) Pengembangan Operasional Sistem Informasi Manajemen LLA;
- 8) Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota;
- 9) Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 10) Analisa dan Evaluasi Lalu Lintas pada Ruas Jalan Utama di Jawa Timur;
- 11) Evaluasi Manfaat Prasarana Fasilitas LLAJ;
- 12) Perhitungan biaya ekonomi masyarakat pemakai jasa angkutan umum di jalan;
- 13) Manajemen Perencanaan Transportasi Jalan;
- 14) Survey Load Factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan dalam propinsi di Jawa Timur;
- 15) Pembangunan dan peningkatan jalan keluar masuk jembatan timbang;
- 16) Pembangunan dan peningkatan lahan parkir jembatan timbang;
- 17) Pembangunan dan peningkatan pagar pengaman jembatan timbang;

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan prasarana dan sarana fasilitas LLAJ guna mendukung pelayanan sektor transportasi.

Kegiatan pada program ini dititikberatkan, antara lain pada:

- 1) Pemeliharaan peralatan jembatan timbang Se-Jawa Timur;
- 2) Pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas;
- 3) Pemeliharaan dan perawatan pagar pengaman jalan (Guard Rail);
- 4) Pemeliharaan dan perawatan RPPJ;
- 5) Pemeliharaan dan perawatan Traffic Light;
- 6) Rehab ruang unjuk kerja pelayanan ISO 9001:2000;
- 7) Pemeliharaan jalan keluar masuk jembatan timbang;
- 8) Pengembangan dan pemeliharaan komputerisasi;
- 9) Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan interkoneksi;
- 10) Pembangunan rumah genset dan pengadaan genset di jembatan timbang;
- 11) Pembangunan dan peningkatan gudang jembatan timbang.

3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan guna mendukung pelayanan sektor transportasi.

Kegiatan pada program ini dititikberatkan, antara lain pada:

- 1) Pengadaan marka jalan;
- 2) Pengadaan pagar pengaman jalan;
- 3) Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Se-Jawa Timur;
- 4) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- 5) Kampanye keselamatan lalu lintas jalan;
- 6) Operasi sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan;
- 7) Pengadaan dan pemasangan RPPJ Model F;
- 8) Pengadaan dan pemasangan RPPJ Model Bando;
- 9) Penyelenggaraan angkutan mudik dan balik gratis;
- 10) Penyelenggaraan rest area;
- 11) Pengadaan dan pemasangan Traffic Light;
- 12) Pengadaan dan pemasangan Flashing Light;
- 13) Pemeliharaan dan perawatan VMS;
- 14) Pemeliharaan dan perawatan Warning Light;
- 15) Pembangunan pos pantau.

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan pelayanan angkutan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan guna mendukung pelayanan sektor transportasi.

Kegiatan pada program ini dititikberatkan, antara lain pada:

- 1) Pertemuan dan pembinaan penguji kendaraan bermotor;
- 2) Pemilihan penguji teladan tingkat propinsi Jawa Timur;
- 3) Pembinaan pengusaha karoseri dan kontruksi kendaraan bermotor;
- 4) Pembinaan teknis Petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ;
- 5) Peningkatan SDM melalui In House Training;
- 6) Pemetaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dalam rangka penerapan Nomor Rute Jalan Propinsi;
- 7) Analisa Biaya Kompensasi kemacetan di Surabaya Metropolitan Area;
- 8) Analisa dan Evaluasi Manajemen Lalu Lintas serta kebutuhan fasilitas.

B. Program Penunjang

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman, murah, dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan transportasi umum perkotaan, dan juga pedesaan, yang terpadu dan terjangkau, berbasis masyarakat dan wilayah.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
- 3) Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand management.
- 4) Fasilitasi pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan yang padat (kota metropolitan).
- 5) Penyediaan pelayanan angkutan umum perintis, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil.
- 6) Pengembangan sistem kerja sama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi), dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan.
- 7) Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun.
- 8) Evaluasi dan penyusunan program kerja;
- 9) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
- 10) Pembinaan pengemudi angkutan penumpang umum;
- 11) Koordinasi teknis Bidang LLAJ antara Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 12) Monitoring evaluasi guna menunjang operasional kegiatan;
- 13) Penyusunan LAKIP kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ;
- 14) Koordinasi dengan pengusaha angkutan;
- 15) Sertifikasi ISO 9001:2000;
- 16) Pembinaan pengemudi angkutan barang;
- 17) Evaluasi tarif AKDP di Jawa Timur;
- 18) Pengadaan dan pemasangan papan informasi di terminal wajib lapor;

2. PERKERETAAPIAN

Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Kontribusi perkeretaapian berdasarkan pangsa angkutan yang dihasilkan secara nasional masih sangat rendah dibandingkan moda angkutan lain

Sistem perkeretaapian di Jawa Timur telah dibangun sejak era kolonialisme Hindia-Belanda. Jalur kereta api di Jawa Timur terdiri jalur utara (Surabaya Pasar Turi-Semarang-Jakarta), jalur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta-Jakarta), jalur lingkaran selatan (Surabaya Gubeng-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya), dan jalur timur (Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi). Jawa Timur juga memiliki sistem transportasi kereta komuter dengan rute Surabaya-Sidoarjo-Porong, Surabaya-Lamongan-Babat, Surabaya-Mojokerto, dan Malang-Kepanjen. Jaringan jalan rel kereta api yang beroperasi pada 2007 di Jawa Timur, sepanjang 986,307 kilometer, terdiri dari lintasan raya 865,139 kilometer, dan lintasan cabang 121,168 kilometer.

Perkeretaapian pada umumnya masih memiliki fungsi untuk pelayanan umum, serta berbagai penugasan dari pemerintah (public service obligation) dengan kompensasi berupa subsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Secara umum kendala perkeretaapian sebagai suatu industri jasa angkutan yang mandiri sulit dapat berkembang secara komersial ataupun menguntungkan.

Peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengembangan kereta api nasional, baik dalam aspek pendanaan dan investasi, regulasi, serta pengembangannya. Dengan keterbatasan pendanaan, SDM dan kelembagaan di bidang perkeretaapian, kondisi fisik prasarana dan sarana kereta api saat ini masih banyak mengalami backlog pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus, baik karena perencanaan, pengoperasian dan dukungan pendanaan yang masih terbatas.

Perkeretaapian nasional mengalami kejenuhan di setiap aspek, seperti manajemen, struktur kelembagaan, kapasitas lintas, kondisi sarana (lokomotif dan gerbong), kondisi rel yang sudah tua dan aus, kekurangan investasi dan dana pemeliharaan, citra pelayanan kepada konsumen dan masyarakat, kekakuan

investasi karena sifat “*natural monopoly*”, masalah regulasi kelembagaan dan struktur pasarnya.

a. Permasalahan :

- 1) Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA dan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA) yang telah melampaui batas umur teknis, serta banyak terjadi *backlog* pemeliharaan prasarana.
- 2) Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian karena sebagian besar telah melampaui umur teknis, serta kondisi perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak siap operasi.
- 3) Tingginya tingkat kecelakaan KA, terutama akibat *backlog* pemeliharaan, dan rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
- 4) Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi), serta banyaknya gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan kereta api akibat banyak munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di sepanjang jalur.
- 5) Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya keterpaduan pelayanan antar-moda, kondisi prasarana dan sarana, terbatasnya pengembangan lintas jaringan pelayanan dan sumber daya perkeretaapian.
- 6) Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api (produktivitas angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan). Juga masih rendahnya kualitas SDM perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan, terutama keselamatan angkutan, yang tercermin dari menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan.
- 2) Meningkatnya penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama
- 3) Meningkatnya kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian.
- 2) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antar-moda dan inter-moda.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, terutama pada koridor yang telah jenuh, serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana perkeretaapian untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan dan pengembangan secara bertahap kereta komuter di wilayah Gerbangkertasusila dalam satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi.
- 2) Fasilitasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perkeretaapian.
- 3) Fasilitasi peningkatan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
- 4) Fasilitasi revitalisasi jaringan kereta api di Pulau Madura, dari Bangkalan ke Sumenep, dalam rangka membangun satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi.

- 5) Fasilitasi peningkatan jalur kereta api Bangil-Jember-Banyuwangi, yakni penggantian bantalan rel dari kayu menjadi beton, perbaikan jembatan, serta jalur rel.
- 6) Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api pengganti jalur Tanggulangin-Porong.

B. Program Penunjang

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kereta Api

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kereta api, yang aman, murah, dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Sidoarjo-Tulangan-Prambon-Tarik untuk mengatasi problem transportasi yang terkendala dampak luapan lumpur Lapindo.
- 2) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Kalisat (Jember)-Bondowoso-Situbondo-Panarukan.
- 3) Peningkatan pelayanan kereta api peti kemas (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya–Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).
- 4) Fasilitasi penyediaan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi untuk masyarakat miskin yang tarifnya disesuaikan daya beli mereka.

3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) didefinisikan sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus; kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan perairan; mempunyai rute tetap dan jadwal reguler, serta bangunan kapal ferry yang berbentuk khusus.

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar-pulau,

sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.

a. Permasalahan

- 1) Masih terbatasnya sarana yang tersedia.
- 2) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP.
- 3) Belum optimalnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP, baik dalam investasi pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan angkutan perintis.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan (Ketapang-Gilimanuk dan Kamal-Surabaya) yang padat.
- 2) Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP.
- 3) Meningkatnya keselamatan ASDP.
- 4) Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis.
- 5) Meningkatnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan ASDP.

- 2) Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh, seperti Ketapang-Gilimanuk, dan Surabaya-Kamal.
- 3) Mendorong peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas ASDP

Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dermaga penyeberangan.
- 2) Pengembangan sarana dan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah kepulauan melalui pendekatan pembangunan transportasi wilayah.

4. TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Hampir 99% kegiatan ekspor-impor diangkut menggunakan transportasi laut. Transportasi laut juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar-pulau (dalam negeri) yang dilayani armada pelayaran nasional.

a. Permasalahan

- 1) Terpuruknya peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan, dan belum diberlakukan sepenuhnya azas *cabotage*.
- 2) Masih adanya biaya ekonomi tinggi, dan kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan, menambah beban bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya bagi masyarakat secara umum.
- 3) Tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran seperti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) belum memenuhi persyaratan internasional.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi laut yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor
- 2) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan, khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN;
- 3) Terlengkapinya sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan fasilitas pemeliharaannya.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan transportasi laut dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas *cabotage*. Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada.
- 2) Mengurangi, bahkan menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan, sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang.
- 3) Pemenuhan standar pelayaran internasional untuk peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana transportasi laut.
- 2) Pengembangan pembangunan terminal peti kemas.
- 3) Peningkatan pelayanan transportasi laut bagi wilayah kepulauan.
- 4) Pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SNBP).
- 5) Pengembangan usaha di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta, *out-sourcing* maupun *public private partnership*, pada lokasi pelabuhan potensial sebagai akses sentra produksi dan pemasaran komoditas antar-wilayah, termasuk untuk penumpang.

B. Program Penunjang

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Laut

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut yang nyaman, murah dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Fasilitasi pembangunan pelabuhan laut di daerah.
- 2) Fasilitasi pengoperasian kapal laut perintis.

5. TRANSPORTASI UDARA

Transportasi udara memiliki keunggulan kecepatan dibanding moda transportasi lainnya, menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara di Jawa Timur perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional, dan interkoneksi dengan moda transportasi lainnya.

Wisatawan mancanegara yang datang Jawa Timur menggunakan transportasi udara, karena itu untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia.

Jaminan itu dapat diwujudkan, baik oleh lembaga pemerintah pemegang otoritas pengelola transportasi udara maupun operator bandara dan perusahaan penerbangan, dengan memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

a. Permasalahan

Provinsi Jawa Timur memiliki satu bandara internasional, yakni Juanda, yang menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Bandara lainnya adalah Bandara Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara Iswahyudi di Madiun, Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, serta Bandara di Kabupaten Banyuwangi. Penjajakan rencana pembangunan Bandara perintis di Kabupaten Pacitan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik sudah dilakukan sejak 2003. Kebutuhan infrastruktur bandara di beberapa daerah kabupaten/kota untuk mendukung sektor pariwisata dan perdagangan di Jawa Timur sangat dibutuhkan.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi udara yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya jaminan keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara, baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis.
- 2) Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara di daerah-daerah Jawa Timur, terutama daerah yang memiliki potensi wisata dan perdagangan yang tinggi.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan transportasi udara dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

- 1) Pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara, baik di terminal internasional maupun domestik, Bandara Juanda.

- 3) Revitalisasi lapangan udara perintis yang sudah ada untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi bandara penerbangan sipil.
- 4) Mengembangkan fungsi bandara militer untuk melayani penerbangan sipil, yakni Bandara Abdulrachman Saleh dan Iswahyudi.
- 5) Pembangunan lapangan udara perintis di beberapa daerah yang potensial dan strategis.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

A. Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara di bandara yang sudah ada, serta mengembangkan pembangunan prasarana transportasi udara di daerah-daerah potensial strategis untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan transportasi udara di Bandara Juanda, baik terminal internasional maupun domestik.
- 2) Pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi udara di Bandara Juanda.
- 3) Fasilitasi revitalisasi lapangan udara Trunojoyo, Sumenep.
- 4) Penyelesaian pembangunan lapangan udara perintis di Kabupaten Pacitan, dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Militer Abdulrachman Saleh dan Iswahyudi untuk melayani penerbangan sipil.
- 6) Fasilitasi pembangunan lapangan udara di wilayah kabupaten/kota yang strategis dan potensial.

B. Program Penunjang

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Udara

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi udara yang nyaman dan terjangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1) Pembangunan jalan akses Bandara Abdurrahman Saleh, Malang
- 2) Fasilitasi pembangunan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi.
- 3) Fasilitasi pembangunan Bandara Notohadinegoro, Jember.

Agenda penting dalam RPJMD yang bersesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur adalah **Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Terutama Melalui Pengembangan Agroindustri / Agrowisata dan Perbaikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi.**

Arah dan Kebijakan umum untuk mencapai agenda RPJMD adalah Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana serta ijin pengemudi di jalan). Sedangkan strategi dan prioritas program adalah Menunjang isu-isu strategis, yaitu percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya serta pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

B. KEGIATAN TAHUN 2009 - 2014 :

PROGRAM UTAMA

1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Fasilitas LLAJ

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai salah satu wujud pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat. Selama periode angkutan laebaran, natal dan tahun baru selalu terjadi eskalasi kebutuhan pergerakan orang dan barang terutama dari wilayah perkotaan

menuju wilayah pedesaan pada saat musim arus mudik dan arah sebaliknya pada saat musim arus balik.

Permasalahan pokok yang hampir selalu terjadi pada penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru adalah keterbatasan sarana angkutan khususnya angkutan darat dalam mengantisipasi membludaknya arus mudik/ arus balik sehingga mengurangi tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Disamping terbatasnya sarana, pola dan manajemen lalu lintas juga perlu mendapatkan perhatian terutama untuk meningkatkan kapasitas layanan dengan mengoptimalkan seluruh prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran operasional. Dampak yang ditimbulkan ialah terjadinya kemacetan luar biasa pada jalur-jalur utama, peningkatan waktu perjalanan, peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan adalah menutup seluruh kegiatan pasar tumpah yang berada di sepanjang jalur utama, melakukan manajemen/rekayasa lalu lintas, membuka jalur-jalur alternatif, mengoperasikan terminal bantuan pada beberapa titik konsentrasi keberangkatan penumpang, menghentikan sementara angkutan barang non sembilan bahan pokok pada masa angkutan lebaran, dan lain-lain.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat yang ditandai dengan beberapa indikator antara lain berkurangnya kemacetan pada lintas-lintas utama, berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas, berkurangnya konsentrasi massa pada titik-titik keberangkatan yang biasanya diikuti dengan kerawanan sosial, dan lain-lain

2. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Kajian Teknis Rencana Pengembangan Kereta Api di Pulau Madura

Pelayanan sektor transportasi di Pulau Madura secara umum dapat dikatakan relatif lebih buruk dibandingkan dengan kebanyakan wilayah Jawa. Kebutuhan mobilitas orang dan barang di wilayah daratan Madura hanya dilayani oleh angkutan jalan raya. Padahal sebagaimana diketahui di sepanjang Madura mulai Kamal sampai dengan Kalianget terdapat jalur kereta api yang merupakan peninggalan jaman Belanda. Saat ini prasarana tersebut tidak

termanfaatkan dan menjadi jalur mati. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah sebelumnya yang secara sengaja mematikan angkutan kereta di Madura dan lebih berkonsentrasi kepada pelayanan angkutan jalan raya.

Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan sumberdaya karena infrastruktur yang telah tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal dan menjadikan masyarakat madura kurang memiliki alternatif pilihan moda untuk melakukan pergerakan .

Kajian ini diarahkan untuk memberikan gambaran secara lebih detail dan teknis terhadap kemungkinan rencana menghidupkan kembali jalur kereta api di sepanjang pulau Madura guna memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat. Gambaran tersebut juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di masa depan di mana dengan akan selesai dan dioperasionalkannya jembatan suramadu maka akan mengubah wajah pulau Madura dari yang selama ini terkesan miskin dan terbelakang menjadi sebuah kawan yang maju dan modern dengan tetap tidak meninggalkan khazanah budaya dan nilai-nilai adat keindonesiaan yang dijunjung tinggi.

Arah pengembangan kereta api di Madura tidak hanya ditujukan untuk pelayanan angkutan penumpang saja tetapi juga dimungkinkan untuk mengangkut hasil-hasil alam dan kebutuhan perindustrian yang diperkirakan akan tumbuh pesat.

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kereta Api Jawa Timur .

Angkutan kereta api sampai saat ini masih merupakan moda transportasi penting bagi kepentingan pergerakan masyarakat di Jawa Timur. Sebagai moda transportasi andalan untuk angkutan massal, operasional kereta api perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai serta untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api. Dengan jumlah fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana yang relatif tidak mengalami pertumbuhan berarti dari tahun ke tahun, mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan dirasakan tidak mampu mengimbangi semakin meningkatnya jumlah permintaan akan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada perlu disikapi dengan melakukan penambahan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas

mengingat sumberdaya yang tersedia sangat terbatas. Perlu dilakukan penjadwalan yang ketat agar kegiatan yang dilakukan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan transportasi kereta api.

Beberapa kegiatan yang dapat diprioritaskan pada tahun anggaran 2006 antara lain adalah restorasi kereta (gerbong penumpang), pengadaan alat perlengkapan keselamatan transportasi kereta api, pemasangan rambu-rambu, dan lain-lain

2) Penanganan Permasalahan Perlintasan Sebidang yang Tidak Dijaga.

Mengingat kebutuhan dana untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan sangat besar, maka perlu disusun prioritas perlintasan yang perlu segera ditangani serta skenario penanganan manajemen lalu lintas di perlintasan yang rawan kecelakaan.

Perlntasan sebidang merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23/2007 tentang perkeretaapian disebutkan bahwa seharusnya perlntasan antara jalan kereta api (jalan rel) dengan jalan raya tidak boleh sebidang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tingkat keselamatan yang tinggi bagi para pengendara kendaraan di jalan raya. Jumlah perlntasan sebidang yang tidak dijaga di Jawa Timur terdapat tidak kurang dari 1.340 perlntasan.

Berbagai kajian mengenai manajemen pada perlntasan sebidang dan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, memberikan rekomendasi bahwa untuk perlntasan sebidang yang mempunyai volume lalu lintas kendaraan yang sangat padat maka direkomendasikan untuk dibangun flyover sehingga perlntasan tersebut menjadi tidak sebidang. Pada beberapa tempat lain harus dipasang pintu perlntasan dengan penjaga pintu yang selalu siap ditempat sepanjang waktu. Untuk perlntasan-perlntasan lainnya yang merupakan bagian terbesar dari perlntasan yang ada sampai saat ini masih belum dilengkapi dengan pintu perlntasan dan tidak ada personil penjaga yang selalu siap di tempat.

3) Kajian Teknis Penataan Jalur Kereta Api Surabaya – Lamongan

Keberhasilan pengoperasian kereta api komuter pada lintas Surabaya – Lamongan dan diterusnya sampai dengan Porong memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan alternatif pilihan moda untuk melakukan perjalanan. Tetapi ditinjau dari kebutuhan

untuk mengurangi beban lalu lintas jalan pada koridor Surabaya – Lamongan maka komuter tersebut belum mampu menjawab problematika yang ada. Ruas-ruas jalan pada koridor tersebut masih saja dipenuhi oleh banyaknya kendaraan baik mobil pribadi, sepeda motor dan angkutan umum serta kendaraan barang, sehingga di hampir setiap waktu terjadinya kemacetan tidak bisa dihindarkan. Hal ini menyebabkan adanya pandangan yang sedikit sinis di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa secara kasat mata pengoperasian KA komuter tidak mampu mereduksi kepadatan lalu lintas jalan raya.

Berangkat dari pola pikir tersebut maka sudah saatnya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap keberadaan jalur dan layanan angkutan kereta api koridor Surabaya – Lamongan. Eksplorasi terhadap seluruh kemungkinan penataan jalur tersebut hendaknya tidak hanya berfokus kepada jalur-jalur eksisting yang saat ini telah beroperasi tetapi juga diharapkan mampu merumuskan alternatif jalur-jalur lain, baik dengan memanfaatkan jalur-jalur KA yang tidak aktif (rel mati) maupun dengan mencoba membuka jalur baru dalam bentuk elevated railways.

Jalur-jalur alternatif yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah Surabaya – Gresik – Lamongan. Infrastruktur kereta api yang terdapat pada jalur ini perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama dengan meningkatkan jenis spoor yang ada, dari spoor 24 menjadi spoor 42, pembangunan shelter-shelter baru, pembenahan beberapa stasiun pendukung, pembenahan sintelis (sinyal, telekomunikasi dan listrik).

3. Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Lalu Lintas ASDP

1) Studi Penyusunan Master Plan Pengembangan Angkutan Penyeberangan di Kepulauan

Wilayah kepulauan Jawa Timur merupakan wilayah yang secara rata-rata relatif tertinggal dibandingkan wilayah daratan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sarana transportasi yang melayani wilayah tersebut sehingga aksesibilitas masyarakatnya juga terkendala. Pada umumnya sarana transportasi yang saat ini melayani sebagian besar wilayah kepulauan adalah kapal laut/perahu, dimana pada umumnya kapal laut mempunyai fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kapal penyeberangan.

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut maka di masa depan keberadaan angkutan penyeberangan diharapkan dapat menjadi tulang punggung transportasi antar wilayah kepulauan. Jalan menuju ke sana sudah mulai dirintis dengan dibangunnya beberapa dermaga penyeberangan di pulau Sapudi, Kangean, Raas dan sapekan serta yang sekarang telah selesai pembangunannya adalah pelabuhan Penyeberangan Pulau Bawean.

Penyusunan studi ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif dan utuh master plan sistem transportasi penyeberangan antar pulau di wilayah kepulauan Jawa Timur sesuai dengan hirarki. Dalam konsep yang telah tersusun saat ini ditetapkan bahwa pelabuhan penyeberangan yang berlokasi di Paciran Lamongan dan sedang dalam proses pembangunan di desain sebagai pusat pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya. Hal yang lebih penting adalah konsep master plan pelabuhan penyeberangan ini harus tetap dalam koridor dan menjadi bagian integral dari sistem transportasi wilayah Jawa Timur. Keberadaannya tidak harus menggantikan peran dan fungsi transportasi laut yang secara alamiah telah terbentuk lebih dahulu.

2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Barat Lamongan

Pembangunannya mendekati penyelesaian dimana yang digunakan untuk pelayanan penyeberangan antar komposisi dimana selama ini kapal penyeberangan masih sandar di Pelabuhan Laut tanjung Perak. Dimana keberadaan pelabuhan tersebut yang sangat besar maka kebutuhan akan prasarana pelabuhan penyeberangan yang baik selalu menjadi tuntutan publik.

Salah satu titik krusial dalam pelayanan lintas penyeberangan Paciran Kab. Lamongan masih belum tercukupi dengan adanya dana APBN fasilitas yang tersedia saat ini

Pembangunan fasilitas ini terkait erat dengan keselamatan pelayaran dimana akhir-akhir ini sering menjadi sorotan yang sangat tajam dari masyarakat terkait dengan sering terjadinya kecelakaan di bidang transportasi yang memakan banyak korban jiwa. Dengan melengkapi beberapa fasilitas yang masih kurang, diharapkan kecelakaan terutama yang disebabkan oleh faktor teknis keterbatasan prasarana, dapat diminimalisir.

3) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi.

Selain lintas penyeberangan Ujung Kamal, lintas Ketapang Gilimanuk juga merupakan lintas penyerangan yang cukup padat. Selain angkutan penumpang dan kendaraan, pada lintas ini juga beroperasi kapal penyeberangan yang khusus melayani angkutan barang dengan kendaraan dan dilayani oleh dermaga tersendiri yang terpisah dengan dermaga untuk penumpang dan kendaraan.

Pada lintas ini beroperasi kapal-kapal penyeberangan yang mempunyai bobot mati relatif lebih besar dibandingkan pada lintas Ujung Kamal karena lintas ini menyeberangi selat Bali yang mempunyai arus cukup kuat. Ukuran kapal sangat berpengaruh kepada kualitas dan kekuatan dermaga yang dibutuhkan sehingga untuk mempertahankan keselamatann pelayaran maka peningkatan dan pemeliharaan seluruh prasarana yang ada khususnya dermaga harus terus menerus dioptimalkan. Kerusakan yang terjadi pada dermaga biasanya diakibatkan oleh ketidacermatan nahkoda kapal ketika sedang melakukan manuver untuk sandar kapal.

Dengan melakukan pemeliharaan prasarana secara rutin dan peningkatan prasarana baru yang diperlukan maka diharapkan kelancaran arus bongkar muat penumpang dan kendaraan akan semakin baik.

4) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Raas dan Giliraja Kab. Sumenep.

Pada awal tahun 2005, telah dioperasikan lintas penyeberangan baru di Jawa Timur yaitu Kalianget – Sapudi Pulau Raas dengan waktu tempuh selama 3 jam perjalanan. Rute penyeberangan ini sangat berarti bagi mobilitas penduduk di pulau Sapudi dan Raas mengingat selama ini kebutuhan transportasi antar pulau hanya dilayani oleh kapal laut/perahu dengan melalui dermaga laut. Padahal dalam beberapa tahun terakhir kondisi dermaga laut di Sapudi dan Raas dalam keadaan rusak sehingga tidak mampu memberikan pelayanan secara optimal. Dengan telah beroperasinya dermaga penyeberangan di Sapudi dan Raas maka kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik dan hasil bumi masyarakat Sapudi dapat dipasarkan ke luar pulau.

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang diberikan, maka dermaga Sapudi perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang sampai

saat ini masih belum tersedia. Fasilitas tersebut antara lain kantor pelabuhan, gedung terminal, gudang penimbunan barang, lahan parkir, jalan akses menuju pelabuhan, fasilitas listrik dan air bersih serta fasilitas telekomunikasi yang memadai. Untuk sementara ini pelayanan yang diberikan hanya sebatas kepada pelayanan dari sisi laut berupa dermaga, trestle, breasting dan mooring dolphin serta kolam pelabuhan.

Dengan fasilitas pendukung yang semakin lengkap maka tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang dari pulau Sapudi akan dibuka jalur penyeberangan baru seperti Pulau Raas Sapudi-Jangkar, Sapudi-Benoa, Sapudi-Kangean dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan jelas sangat menguntungkan bagi perkembangan masyarakat Sapudi karena keberadaan dermaga penyeberangan akan mampu membuka keterisolirannya dari dunia luar.

5) Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Pulau Kangean Kab. Sumenep

Dermaga penyeberangan Pulau Kangean merupakan salah satu dermaga yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. Saat ini pelayanan yang diberikan adalah angkutan penyeberangan Pulau Kangean Kalianget dengan waktu tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Manfaat dari beroperasinya lintas penyeberangan ini adalah untuk mereduksi waktu perjalanan dari wilayah ujung timur pulau Madura menuju ujung timur pulau Jawa. Permintaan jasa transportasi pada lintas ini cukup tinggi mengingat adanya kedekatan sosial budaya antara dua wilayah yang dihubungkan yaitu sebagian besar masyarakatnya merupakan warga etnis madura yang dikenal mempunyai mobilitas yang tinggi.

Saat ini kondisi dermaga Pulau Kangan kurang memenuhi persyaratan untuk sebuah operasional kapal penyeberangan sehingga memerlukan penanganan mendesak dalam bentuk rehabilitasi fasilitas yang tersedia.

Dengan rehabilitasi tersebut, diharapkan pelayanan kepada pengguna jasa akan semakin baik dan perekonomian masyarakat akan meningkat.

6) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan pulau Gili Keatapang dan Probolinggo.

keberadaan Pulau Giliketapang sangat penting bagi masyarakat di Pulau tersebut jarena selama ini untuk kegiatan ekonomi di eilayah tersebut masih

menggunakan perahu diaman aspek keselamatan sangat berpengaruh, sekali untuk lebih menjamin aspek keselamatan, kelancaran dan kemudahan maka perlu dikembangkan infrastruktur transportasi berupa angkutan penyeberangan

- 7) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Paciran kabupaten Lamongan
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Paciran kabupaten Lamongan mempunyai fungsi yang sangat strategis didalam pengembangan wilayah yang nantinya akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, dimana di wilayah utara tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur akan dikembangkan menjadi kawasan Industri, sehingga keberadaan Pelabuhan tersebut akan menjadi simpul transportasi keluar dan masuk barang dan penumpang yang akan menuju ke arah berbagai provinsi sehingga akan lebih berkembang di masa ke depan.

4. Program Pembangunan dan Peningkatan Transportasi Laut

- 1) Pengembangan Pelabuhan Brondong Kab. Lamongan.

Pelabuhan Brondong Lamongan adalah salah satu pelabuhan yang berfungsi sebagai pelayanan pelabuhan regional kedepan akan di bangun diluar kawasan selatan Bengawan Solo, dimana saat ini masih menggunakan sudetan sebagai pelabuhan sehingga kalau dii lihat dari aspek keselamatan akan mempengaruhi apalagi kedepan sungai tersebut debitnya akan lebih besar.

- 2) Pengembangan Pelabuhan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil identifikasi teknis perencanaan pengembangan, maka perlu segera disusun skala prioritas implementasi pelaksanaan pembangunan fisik, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya modal. Jika memungkinkan, maka pembiayaan pembangunan fisik dapat berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten Situbondo, investor swasta (nasional, asing) dan pinjaman luar negeri.

- 3) Master plan Pengembangan Pelabuhan Brondong.

Pelabuhan Brondong dan kawasannya mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi karena terdapat salah satu blok minyak yang mengandung deposit cukup besar. Eksploitasi minyak bumi yang selama ini dilakukan

masih belum optimal sehingga di masa depan masih dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi ladang-ladang minyak baru. Besarnya kandungan minyak dan gas bumi akan mengundang kedatangan kegiatan ekonomi baru baik yang secara spesifik berhubungan langsung dengan produksi minyak maupun kegiatan ekonomi sekunder. Diperkirakan, kawasan Tuban, Lamongan dan Gresik akan menjadi sebuah kota baru yang mandiri dengan segala kelengkapan fasilitasnya sehingga kebutuhan akan sarana transportasi akan semakin urgen.

Salah satu prasarana transportasi yang perlu segera mendapat pembenahan adalah pengembangan pelabuhan Tuban. Sampai saat ini di kawasan pelabuhan Tuban baru terdapat 1 buah pelabuhan khusus yaitu pelabuhan khusus Lamongan integreted short base.

4) Pengembangan Pelabuhan Sendang Biru Kab. Malang.

Berdasarkan hasil identifikasi teknis perencanaan pengembangan, maka perlu segera disusun skala prioritas implementasi pelaksanaan pembangunan fisik, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya modal. Jika memungkinkan, maka pembiayaan pembangunan fisik dapat berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten Malang, investor swasta (nasional, asing) dan pinjaman luar negeri.

5) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi Pelayaran dan Lampu Penerangan Pelabuhan Laut Jawa Timur .

Faktor keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi adalah suatu hal sangat penting dan mendasar. Dalam kondisi bagaimanapun faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Tingkat keselamatan transportasi sangat dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain ialah kondisi sarana, kondisi prasarana, kecakapan operator, faktor alam dan sebagainya.

Dalam hal penyelenggaraan transportasi laut, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran adalah ketersediaan rambu dan lampu penuntun navigasi pelayaran. Peralatan ini sangat penting mengingat di laut lepas tidak ada tanda-tanda alam yang dapat memberikan informasi mengenai kedalaman alur, adanya karang, arus laut dan sebagainya, khususnya untuk kapal/perahu kecil/perahu

nelayan yang tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang baik, seperti GPS (*Global Positioning System*), radar, kompas, sonar dll.

Dengan dipasangnya rambu dan lampu navigasi pelayaran pada posisi yang tepat maka setidaknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi nahkoda kapal untuk mengendalikan laju dan arah kapal sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan di laut dapat dihindarkan.

6) Penyusunan Rencana Induk/Master Plan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Jembatan Timbang di Jawa Timur.

Penyusunan rencana Jembatan Timbang dimaksudkan untuk memberikan arah penataan dan pengembangan Jembatan Timbang di masa depan. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana induk adalah program pembangunan jalan tol lintas pasuruan, perkembangan kawasan industri di pasuruan, dan lain-lain.

Dalam rangka pembangunan Jembatan Timbang adalah untuk meningkatkan faktor keselamatan angkutan jalan maka setiap upaya yang mempunyai potensi untuk terjadinya kecelakaan di jalan harus dapat dikendalikan. Kelebihan muatan adalah salah satu contoh faktor yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu setiap barang yang akan masuk melewati ruas jalan harus ditimbang untuk menentukan berat muatan. Disinilah diperlukan suatu alat ukur berat yang cukup representatif dalam bentuk pemasangan jembatan timbang, dimana salah satu peran penting dari jembatan timbang adalah mengendalikan berat muatan angkutan barang.

Di samping berfungsi untuk mengendalikan jumlah muatan, jembatan timbang juga dapat digunakan untuk kontrol terhadap besaran tarif yang dikenakan terhadap setiap satuan berat muatan. Dengan menggunakan jembatan timbang maka akurasi penimbangan muatan akan semakin baik sehingga kerusakan jalan akibat muatan lebih dari angkutan barang dapat dikurangi.

Pemasangan jembatan timbang harus dilakukan secara cermat pada lokasi yang tepat sehingga fungsi kontrol terhadap muatan kendaraan dapat terpenuhi tetapi keberadaanya tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk penumpang dan barang.

7) Sosialisasi dan Koordinasi Teknis Bidang Transportasi Laut.

Komponen yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi laut sangat beragam dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi dalam lingkup yang lebih makro masing-masing komponen tersebut mempunyai tujuan dan concern yang sama ialah bagaimana masing-masing memainkan peran untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan laut yang aman, cepat, dan biaya terjangkau. Namun pada kenyataannya tidak setiap komponen mampu memahami tujuan bersama tersebut dengan baik sehingga masing-masing pihak lebih berpikir untuk meningkatkan keuntungannya sendiri tanpa terlalu peduli kepada kepentingan pihak lain. Dalam kerangka memadukan pola pikir dan gerak langkah untuk mencapai tujuan bersama tersebut diperlukan suatu langkah sosialisasi dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan seluruh stake holder terkait. Masing-masing pihak diharapkan mampu *sharing* kepentingan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

8) Kampanye Keselamatan Pelayaran sebesar Rp. 1 Milyard

Kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan pelayaran harus terus menerus disosialisasikan secara efektif sehingga kesadaran tersebut akan mendorong masyarakat untuk berperilaku aman dalam melakukan pelayaran. Tujuan umum pelaksanaan kampanye ini adalah memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat luas dan kepada pelaku jasa pelayaran tentang bagaimana berlayar yang aman.

Model kampanye yang digunakan berupa rapat akbar, demonstrasi penanggulangan kecelakaan laut, pembagian sticker/brosur, kegiatan sosial, dan lain-lain. Dengan pendekatan tersebut diharapkan masyarakat luas akan semakin sadar akan pentingnya aspek keselamatan pelayaran.

9) Sosialisasi dan Pembinaan teknis DLKR/DLKP di Jawa Timur.

Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) adalah merupakan suatu kawasan perairan dan daratan di sekitar pelabuhan yang difungsikan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Pengelolaan DLKR/DLKP menjadi wewenang administrator pelabuhan atau kantor pelabuhan, baik untuk kegiatan pemerintahan, operasional maupun perusahaan.

10) Pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Prbolinggo.

Pelabuhan Tanjung Tembaga mempunyai fungsi pelayanan yang sangat strategis sebagai Back Up sistem transportasi menjadi pelabuhan alternatif untuk kegiatan Bongkar muat barang dengan tujuan ekspor, dimana saat ini pembangunan pelabuhan tersebut tahun ini mendekati penyelesaian pemabangunan fisiknya sedangkan untuk fasilitas penunjang maka dikembangkan yang berupa pergudangan dan lapangan penumpukan.

11) Pembangunan Pelabuhan Laut Amplong Kab. Sampang, Pelabuhan Laut Telaga Biru Kab. Bangkalan.

Merupakan pelabuhan regional yang difungsikan untuk pelayanan pelayaran regional bagi kapal – kapal pelayaran nasional maupun regional. Serta sebagai simpul transportasi yang akan menghubungkan antara daerah Probolinggo Interlandnya dan dapat mempersingkat waktu perjalanan dari pada melalui jalan darat.

12) Pembangunan Jembatan timbang di Jawa Timur

Dalam rangka pengembangan dan pembangunan jembatan timbang yang berfungsi untuk meningkatkan faktor transportasi, keselamatan dan fungsi pengendalian muatan lebih angkutan barang. Oleh sebab itu setiap barang yang akan melewati ruas jalan harus di timbang untuk menentukan berat muatan, disinilah diperlukan suatu alat ukur dalam bentuk pemasangan jembatan timbang, dengan menggunakan jembatan timbang maka akurasi penimbangan muatan akan semakin baik sehingga kerusakan jalan yang diakibatkan oleh muatan lebih dari mobil barang dapat dikurangi dan dalam rangka mendukung program Pemerintah yaitu Rouda Map To Zero Accident dan Zero Overloading.

13) Pembangunan terminal type A di Jawa Timur

Terminal adalah merupakan simpul transportasi yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang serta pengawasan dan pengendalian mobil bus yang berjadwal, demikian pula terminal sebagai pusat distribusi atau penyebaran pergerakan mobil bus yang melayani angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi. Disamping itu terminal type A yang ada di Jawa timur berjumlah 19 lokasi yang tersebar di Kab./Kota. Dalam pelayanan fungsi terminal akan di kembangkan menjadi terminal yang modern sehingga terminal sebagai

pelayanan transportasi juga sebagai tempat kegiatan bisnis dari hasil produk unggulan daerah tersebut.

5. Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Udara

1) Perencanaan Alternatif Pengembangan Bandar Udara Juanda.

Bandar udara Juanda baru sebagai tempat untuk relokasi bandar udara lama Juanda diperkirakan akan selesai dibangun pada tahun 2006 dan diperkirakan pada akhir tahun 2006 atau selambat-lambatnya awal tahun 2007 telah beroperasi secara penuh. Desain pembangunan bandara Juanda baru adalah untuk melayani pergerakan penumpang pesawat udara dari dan ke Surabaya dengan kapasitas perencanaan sampai dengan 6 juta penumpang per tahun. Melihat perkembangan jumlah angkutan udara yang sangat pesat akhir-akhir ini sebagai dampak deregulasi di bidang transportasi udara, maka diperkirakan pada tahun 2010 target jumlah lalu lintas udara sebesar 6 juta penumpang per tahun akan terpenuhi. Melihat trend tersebut maka pada tahun 2010 problematika bandara Juanda lama yang telah terjadi saat ini akan berluang kembali menimpa bandara Juanda yang baru. Kepadatan air traffic, kepadatan terminal penumpang dan lapangan parkir adalah wajah sehari-hari bandara Juanda baru pada tahun 2010 mendatang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dari semenjak awal sudah harus mulai dipikirkan alternatif lokasi bandar udara baru untuk menampung trend perkembangan angkutan udara. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain ketersediaan lahan yang cukup luas, aksesibilitas yang cukup baik menuju Surabaya, topografi yang sesuai dengan standar keselamatan penerbangan, dan lain-lain. Daerah-daerah satelit Surabaya terutama di wilayah Gerbangkertosusila merupakan alternatif lokasi yang dapat menjadi prioritas kajian yang akan dilakukan.

Dengan kajian teknis ini diharapkan gambaran sebuah bandar udara baru yang bersih, indah, dan modern akan mampu menampilkan wajah Jawa Timur yang elegan dan futuristik.

2) Peningkatan Prasarana Penunjang Bandar Udara Abdulrachman Saleh Kabupaten Malang

Terhitung sejak bulan Mei 2005, pangkalan udara Abdulrachman Saleh Malang telah melayani penerbangan sipil dengan rute Jakarta Malang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan operasional maka perlu segera dilengkapi berbagai peralatan penunjang angkutan udara, seperti terminal penumpang, lahan parkir, gedung operasional, gudang dan lain-lain. Sampai saat ini prasarana penunjang tersebut masih menggunakan sebagian prasarana milik TNI Angkatan Udara karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah.

Denganditingkatkannya prasarana penunjang maka diharapkan kapasitas pelayanan operasional akan meningkat sehingga jumlah penerbangan dari dan ke Malang akan semakin banyak. Penerbangan Jakarta-Malang dapat ditingkatkan lebih dari satu kali sehari, demikian juga rute penerbangan dari Malang ke Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan kota-kota lainnya dapat segera dibuka seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan mobilitas masyarakat Malang dan sekitarnya.

3) Pembinaan Bandar Udara dan Penunjang Angkutan Udara.

Sampai dengan saat ini di Jawa Timur telah beroperasi dua buah bandar udara yang melayani penerbangan komersial yaitu bandara Juanda Surabaya dan bandara Abdulrachman Saleh Malang. Di samping itu ada beberapa bandara kecil yang melayani penerbangan khusus seperti bandara Maselembo dan Pagerungan. Di masa mendatang, penerbangan sipil yang beroperasi di Jawa Timur akan semakin semarak dengan akan dioperasionalkannya bandara Banyuwangi dan bandara Jember, yang saat ini sedang dalam tahap akhir proses pembangunan konstruksi fisik.

4) Manajemen Perencanaan Teknis Perhubungan dan LLAJ.

Untuk perencanaan pembangunan Sektor Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang sinergis di Jawa Timur yang demikian luas.

Proses perencanaan merupakan salah satu tahap manajemen yang paling awal dalam kesatuan proses manajemen modern. Sebuah perencanaan yang baik adalah merupakan salah satu langkah menuju keberhasilan proses manajemen. Dengan perencanaan yang baik setidaknya telah mampu memberikan landasan berpijak yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari. Bahwa pada akhirnya pelaksanaan yang

dilapangan mengalami deviasi dari perencanaan yang telah disusun adalah hal yang lain.

Perencanaan teknis di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi program kegiatan khususnya dalam jangka pendek.

Beberapa kegiatan yang merupakan *content* dari manajemen perencanaan teknis ini adalah antara lain pengumpulan data di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program selama tahun anggaran sebelumnya, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana anggaran satuan kerja, penyusunan rencana kerja satuan kerja, penyusunan harga satuan pokok kegiatan, dan lain-lain.

Mengingat sangat pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar pembuatan perencanaan pembangunan maka kegiatan ini perlu mendapatkan dukungan dari stake holder terkait khususnya dinas perhubungan kabupaten/kota, unit pelaksana teknis departemen perhubungan di daerah, asosiasi/mitra kerja lingkup perhubungan dan lain-lain.

5) Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Tatrabil dan Tatalok di Jawa Timur.

Tataran transportasi wilayah Provinsi Jawa Timur telah tersusun dan telah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Perhubungan RI. Secara hierarki Tatrabil merupakan penerjemahan Tataran Transportasi Nasional di wilayah Jawa Timur sehingga kebijakan yang tercantum dalam tatrabil telah sesuai dengan semangat kebijakan tatanas. Saat ini Tatrabil Jawa Timur sedang berada dalam proses legislasi dengan dewan (DPRD Provinsi Jawa Timur) dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga mempunyai daya ikat dan daya paksa terhadap seluruh komponen transportasi di Jawa Timur

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tatrabil, seluruh kabupaten kota di Jawa Timur diharapkan juga segera menyusun tataran transportasi lokal sebagai penjabaran lebih lanjut dari tatrabil. Fokus penyusunan tatalok harus benar-benar mengacu kepada tatrabil dengan menekankan

kajiannya pada lingkup wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dengan kedalaman kajian yang lebih detail.

Mengingat masih beragamnya kemampuan personil di kabupaten/kota dimana pada beberapa daerah kemampuan personilnya masih terbatas, maka diperlukan usaha sosialisasi tatrawil dan pendampingan dalam penyusunan tatalok. Dengan kegiatan ini diharapkan keterpaduan perencanaan dan program pengembangan transportasi antara Provinsi dan kabupaten/kota akan tercipta sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

6) Fasilitas pembangunan Bandara Notohadinegoro Kab. Jember.

Pembangunan Bandara Notohadinegoro merupakan bandara yang akan dikembangkan menjadi pelayanan penerbangan regional (City Link) yang menghubungkan kota – kota di Jawa Timur yaitu Bandara Blimbingsari Kab. Banyuwangi, Bandara trunojoyo Kab. Sumunep, Bandara di Pulau Bawean Kab. Sumenep dimana bandara tersebut telah mendekati penyelesaian pekerjaan fidiknya.

7) Rapat Koordinasi Teknis Dinas Perhubungan dan LLAJ Se Jawa Timur.

Koordinasi teknis untuk keterpaduan program pembangunan perhubungan di Jawa Timur.

Perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dengan pemberian kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah mngnahsilkan perubahan strutur hubungan pemerinthan di daerah yang sangat signifikan, khususnya antra pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara pemerintah daerah dengan mitra kerja (stake holder) yang terkait. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menenpatkan pemerintah Provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang otonomi sebelumnya (UU 22/1999) memberikan peluang bagi pemerintah Provinsi untuk maminkan peran yang lebih aktif dalam memberikan stimulasi bagi pembangunan di wilayahnya.

Dalam perpektif dan semangat otomomi maka hubungan antara pemerintah Provinsi dan kabupaten kota lebih bersifar hubungan koordinatif sehingga fungsi-fungsi koordinatif harus digunakan sebagai ujung tombak bagi peingkatan kualitas kerjasama antar keduanya.

Pada lingkup Dinas Perhubungan, koordinasi antara dinas perhubungan Provinsi dengan dinas perhubungan kabupaten/kota mutak diperlukan dalam rangka meningkatkan sinkronisasi program pembangunan pada lingkup kewenangan masing-masing. Demikian juga hubungan fungsional antara dinas perhubungan dengan mitra kerjanya seperti asosiasi, badan usaha milik negara pada lingkup perhubungan merupakan suatu keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerja masing-masing pihak.

Dengan koordinasi yang efektif dan intensif maka arus informasi dari masing-masing pihak akan dengan mudah dan cepat diketahui oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mampu memberikan respon dan daya tanggap yang tepat.

8) Kajian Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi Jawa Timur) di Bidang Perhubungan.

Pada umumnya penyediaan prasarana perhubungan merupakan bidang usaha yang tidak banyak menarik minat calon investor untuk menanamkan modal. Kebanyakan prasarana perhubungan bersifat *public good* sehingga secara finansial investasi di bidang prasarana perhubungan tidak layak. Oleh karena itu sebagian besar penyediaan prasarana perhubungan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk *public service obligation (PSO)*. Hanya ada beberapa prasarana perhubungan yang mampu menarik minat investor antara lain pembangunan jalan tol, pembangunan dermaga khusus/pelabuhan khusus, pembangunan jaringan telepon kabel, pembangunan stasiun telekomunikasi.

Sedangkan di bidang sarana perhubungan, yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Hal ini terbukti dengan tingginya keterlibatan masyarakat/investor dalam penyediaan dan pengoperasian sarana perhubungan seperti pengoperasian angkutan jalan raya (mikrolet, bus kota, bus AKDP/AKAP) pelayaran rakyat, pelayaran nasional/ internasional, maskapai penerbangan domestik/internasional, penyelenggara/operator telepon dan lain-lain.

Mencermati hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Perhubungan berkeinginan untuk turut serta memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk penanaman modal/investasi penyediaan sarana perhubungan. Di samping itu, dengan investasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk mendukung maksud tersebut dan agar investasi yang akan ditanamkan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang rencana pembentukan badan usaha milik daerah di bidang perhubungan dengan memperhatikan beberapa aspek penting antara lain ialah : jenis usaha yang paling berpeluang/layak secara finansial, perkembangan kebijakan moneter pemerintah pusat yang berpengaruh, aspek operasional, aspek kelembagaan, aspek legalitas, dan lain-lain.

Mengingat terbatasnya sumberdaya yang tersedia maka pelaksanaan studi ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2006, fokus studi adalah identifikasi awal untuk mengetahui sub-sub bidang perhubungan yang mempunyai prospek bagus bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menanamkan investasinya.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau. Selain itu perlu dikembangkan pembangunan sistem transportasi nasional (Sistranas) untuk mencapai keterpaduan secara intermoda dan keterpaduan dengan sistem tata ruang nasional, pembangunan wilayah dan berkelanjutan; serta terciptanya sistem distribusi nasional, regional dan internasional yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan transportasi antara desa-kota dan daerah produksi-pemasaran serta memadai.

Peran transportasi juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan, dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar-wilayah akan membuka peluang terjadinya perdagangan antar-wilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah.

Dengan adanya pemerataan keterampilan dan keahlian, maupun biaya antarwilayah, akan mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil juga diarahkan agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara mudah, murah, berkualitas, dan terjangkau.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang 2. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum 3. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api 4. Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan
		2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN 2. Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih
		3. Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
2.	Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi	1. Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi 2. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) 3. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi
3.	Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah	1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal 2. Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan

**MATRIK RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 – 2014**

- VISI** : “MEWUJUDKAN PELAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS UNTUK Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah”
- MISI** : 1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat
2. Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai servicing sector dan promoting sector
- TUJUAN** : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
2. Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi
3. Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah
- TUGAS** : melaksanakan Perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan transportasi, pelayanan perizinan, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bidang transportasi serta bimbingan dan pembinaan bidang transportasi
- FUNGSI** : a. Pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
c. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pemberian fasilitas bimbingan keselamatan dan ketertiban Transportasi
d. Pemberian perijinan dan fasilitas bimbingan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, angkutan perkeretaapian, angkutan laut dan angkutan udara, serta penyiapan bahan penetapan tarif angkutan jalan kelas ekonomi
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan serta penyelenggaraan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotorpenetapan tarif angkutan jalan kelas ekonomi

Tujuan 1 (M1) : Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi

Indikator Kinerja Tujuan :

No.	Indikator	Rumus	Target
1	Rata-rata ketepatan waktu angkutan umum sampai tujuan	$f(x) = \frac{\Delta (\Sigma penumpang_{1+2}) \text{ thn } (n - (n - 1))}{\Sigma penumpang_{1+2} \text{ thn } (n - 1)} \times 100\%$	75

No.	Indikator	Rumus	Target
		$t_2 = \frac{t_{kps}}{d_{trayek}} \times 100 \text{ km}$	
2	Rata-rata menurunnya tingkat kejadian kecelakaan	$f(x) = \frac{\sum (\% \text{ IKU I.2} + \% \text{ IKU I.3})}{2} \times 100\%$	-3

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	Nilai Indeks IKM	75.33	70	72	75	78	80	1	Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
		Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum dan ukuran prosentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada awak kendaraan umum	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	POLDA Jatim
										2	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur	2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	POLDA Jatim
										3	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan			
										4	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim			
										5	Inhouse training peningkatan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor			
										4	Monitoring dan Evaluasi Penguji Kendaraan Bermotor	3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
										5	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang			
		Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan Alarm Early Warning System (AEWS) yang	-5	-5	-5	-5	-5	-5	1	Pengadaan dan Pemasangan prasarana penunjang keselamatan jalan di perlintasan sebidang	1	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan	POLDA Jatim

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN			SUMBER DATA / PENJAB	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN		PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1		Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan	dibangun oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada perlintasan resmi antara jalan dan jalur kereta api yang belum memiliki fasilitas palang pintu perlintasan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam penentuan jam keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sebagaimana tercantum pada Kartu Pengawasan (KPS).	85	85	85	85	85	85	2	Pemeliharaan prasarana penunjang keselamatan jalan di perlintasan sebidang	1	Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										3	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian			
										1	Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
										2	Koordinasi dengan pengusaha angkutan	2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
										3	Evaluasi Tarif Angkutan AKDP di Jawa Timur			
										4	Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi			
										5	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)			
6	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang													
7	Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal	3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											
2	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur	Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN	indicator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja system transportasi di wilayah kabupaten/kota	30	30	35	45	50	55	1	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2	Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas LLAJ	2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
										3	Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
										4	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	4	Program Pengendalian dan	

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN			SUMBER DATA / PENJAB	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN		PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
										5	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota		Pengamanan Lalu Lintas	
		Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja Jembatan Timbang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur	80	80	80	80	80	80	1	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional jembatan timbang	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2	Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang dalam pengawasan kegiatan operasional jembatan timbang	2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
										3	Standarisasi ISO 9001: 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang	3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
3	Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi	Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan pengujian kendaran bermotor di wilayah Kab/kota	5	5	7	7	9	9	1	Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2	Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada SDM aparatur sektor perhubungan			
										3	Peningkatan SDM In House Training/Pelatihan Teknis Traffic Light	2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
										4	Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal	3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
										5	Peningkatan SDM melalui In House Training			
										6	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pertemuan/Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor			
										7	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor			

Tujuan 2 (M1) : Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi

Indikator Kinerja Tujuan :

No.	Indikator	Rumus	Target
1	Rata-Rata Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Yang Terlayani	$f(x) = \frac{\sum (\% \text{ IKU II.1} + \% \text{ IKU II.2} + \% \text{ IKU II.3})}{3} \times 100\%$	4,5

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani	Prosentase peserta mudik balik gratis terakomodasi	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan pelayanan angkutan kepada masyarakat dengan menggunakan layanan mudik balik gratis moda bus umum, kereta api dan kapal laut	0.1	0.1	0.75	1	2	2.5	1 Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis	1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2 Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis	2 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										3 Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan	3 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
1	Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan : Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung - Kamal)	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan terhadap masyarakat Jawa Timur. diukur melalui pemantauan pada 3 lintasan penyeberangan utama di Jawa Timur yaitu lintas Jangkar - Kalianget; lintas Ketapang - Gilimanuk dan lintas Ujung - Kamal.	1	1	1	1	1	1	1	1 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi	1 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran		
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang transportasi udara di Bandara Udara Abd Saleh Malang dan	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan Bandara Abdulrachman Saleh Malang	10	10	10	10	10	10	10	1 Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abd. Saleh Malang (pengembangan fasilitas Terminal Keberangkatan)	1 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi	dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi terkait dengan program-program pembangunan dan pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.							2 Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi (Lapangan Parkir Kendaraan, Pembangunan Jalan Inspeksi)		Timur

Tujuan 3 (M2) : Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Tujuan :

No.	Indikator	Rumus	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi	$f(x) = \frac{\sum (\% \text{ IKU III.1} + \% \text{ IKU III.2})}{2} \times 100\%$	23,25

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi	Presentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi air terutama pada wilayah Jawa Timur Kepulauan	25	25	26	26	27	27	1 Pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan 2 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi 3 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran 4 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan 5 Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin 6 Pembangunan Pelabuhan Laut	1 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 2 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Brondong Kab. Lamongan	Transportasi Laut	
										7 Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi		
										8 Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo		
										9 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep		
		Rata-rata Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan	indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut terhadap masyarakat kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi air terutama pada wilayah Jawa Timur Kepulauan.	5.5	6.7	9.8	14.5	18.2	19.5	1 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F	1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
										2 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando		
										3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas		
										4 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan		
										5 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		